



**PENGARUH LOBI YAHUDI
TERHADAP KONFLIK ISRAEL - PALESTINA
(Studi tentang Kebijakan Politik dan Ekonomi AS
Pada Pemerintahan William Clinton)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Wahyu Asmoro Suci

NIM. E1A195047

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

Asal	: Hadiab	Klass
	Pembelian	327,73
Terima Tgl	: 8 JUL 2000	SUC
No. Buk	: 10.2.281	β

S

**PENGARUH LOBI YAHUDI
TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA**

(Studi tentang Kebijakan Politik dan Ekonomi AS
Pada Pemerintahan William Clinton)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (SI)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

OLEH

WAHYU ASMORO SUCI

E1A195047

Pembimbing I

Drs. Soekron Sjah, SU

Pembimbing II

Drs. A. Habibullah, MSI

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS JEMBER

2000

Pengesahan

Diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Guna melengkapi salah satu syarat
Untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Pada Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2000
Pukul : 08.00

Ketua

Panitia Penguji

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Bariman

Drs. Soekron Sjah, SU

Anggota Panitia Penguji

1. Prof. Drs. H. Bariman
2. Drs. Soekron Sjah, SU
3. Drs. Asrial Aziz
4. Drs. A. Habibullah, MSI

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universits Jember

Dekan

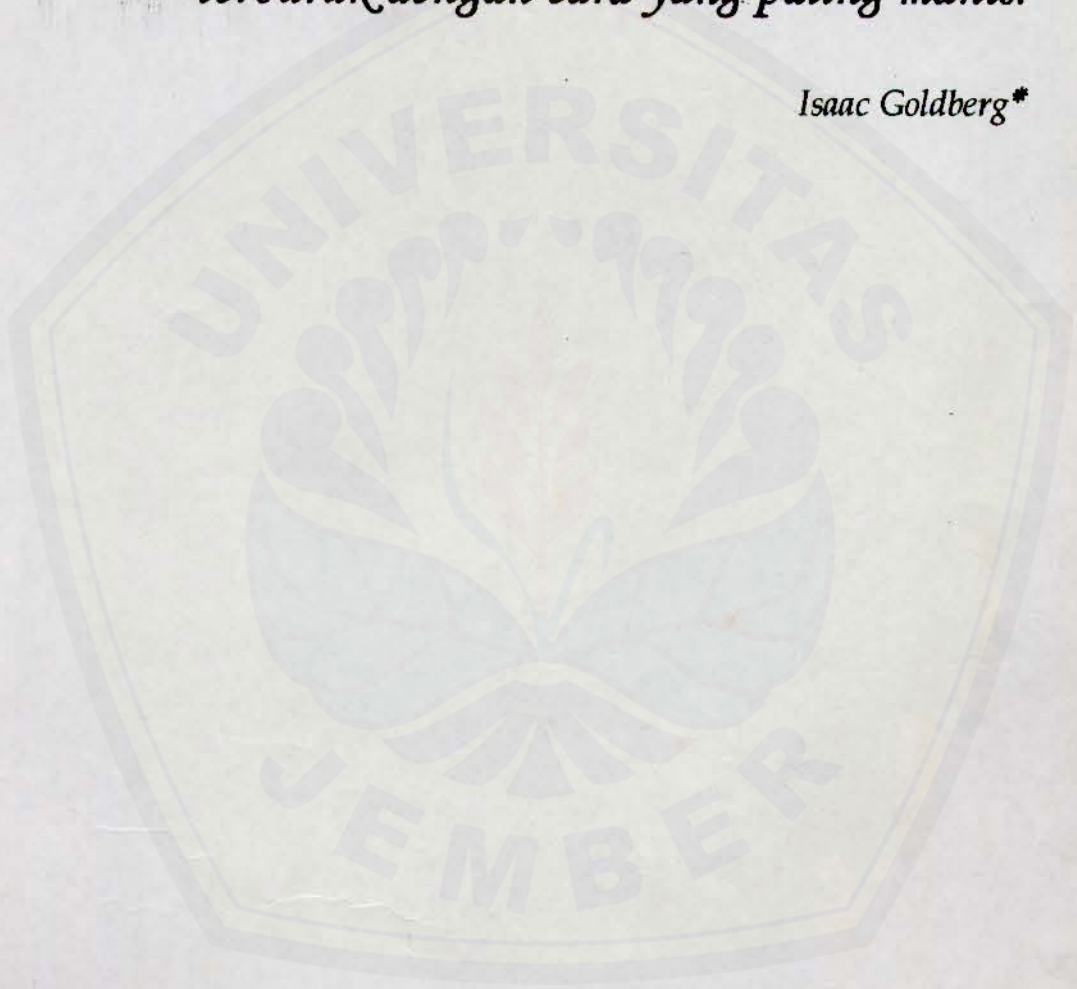


Prof. Drs. H. Bariman
NIP : 130 350 769

Motto :

*Diplomasi dilakukan untuk menyatakan hal
terburuk dengan cara yang paling manis.*

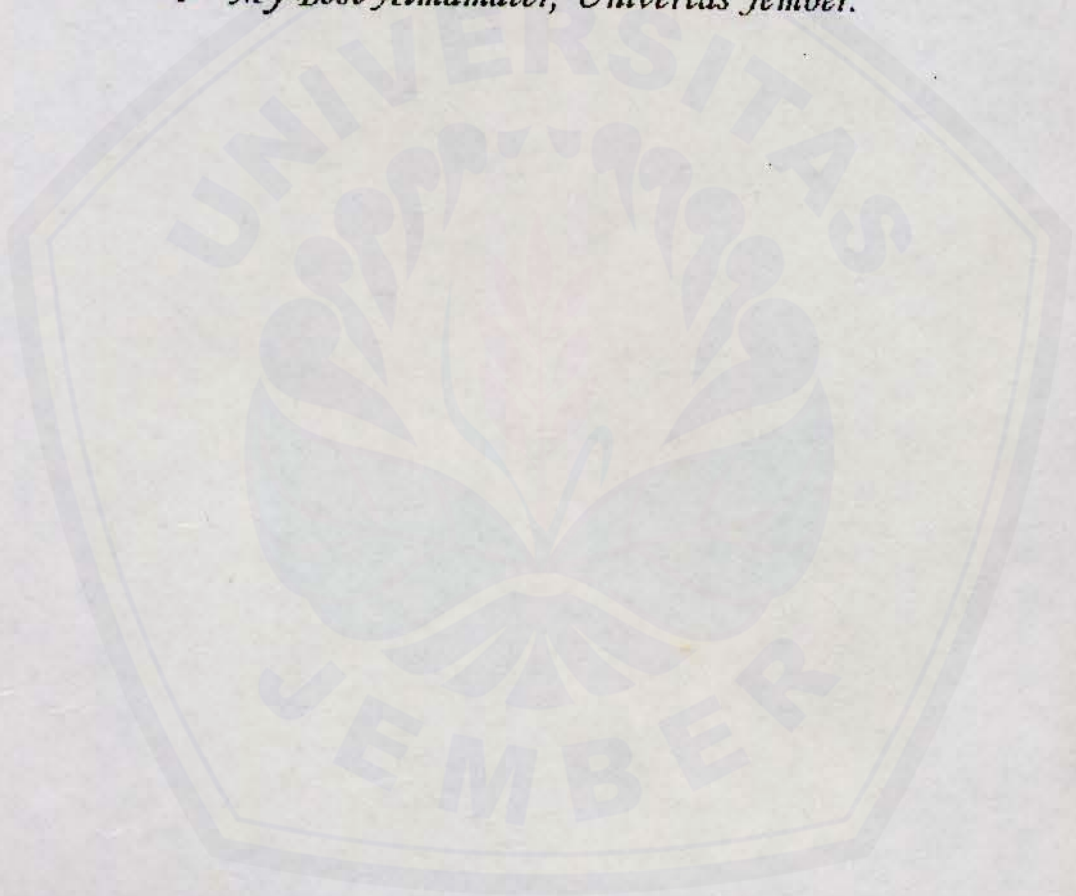
*Isaac Goldberg**



* Intisari, Agustus 1999

Sebuah persembahan untuk

- * *My Dearest Parents,
Bapak Suwarno dan Ibu Misrini,
Terima kasih sebesar-besarnya atas semua doa,
bimbingan, pengorbanan dan perhatiannya.
Semoga bisa menjadi suatu kebanggaan.*
- * *My Only Dear Brother, Sodik Langgeng Waloyo.*
- * *My Best Almamater, Universitas Jember.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	
1.1. Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3. Problematika	8
1.4. Kerangka Dasar Teori.....	9
1.5. Hipotesa.....	13
1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan	
1.6.1. Metode Penelitian Data	14
1.6.2. Metode Analisa Data	15
1.6.3. Pendekatan.....	15
Bab II Gambaran Umum tentang Lobi Yahudi	
2.1. Latar Belakang Terbentuknya Lobi Yahudi	17
2.1.1. Berdirinya Zionisme Israel.....	17
2.1.2. Holocaust dan Pengaruhnya	19
2.2. Perkembangan Masyarakat Yahudi Amerika.....	21
2.2.1. Perkembangan pengaruh zionisme di AS	26
2.2.2. Perkembangan Organisasi-Organisasi Yahudi di AS.....	28
2.2.3. Perkembangan Pengaruh Lobi Yahudi dalam Pemerintahan AS.....	31
2.2.4. Perkembangan Pengaruh AIPAC	32
Bab III Sejarah dan Perkembangan Konflik Israel-Palestina	
3.1. Latar Belakang Konflik Israel-Palestina.....	38
3.2. Masalah Perbatasan dan Perebutan Wilayah.....	41
3.3. Perkembangan Konflik Israel-Palestina.....	44
3.3.1. Peran AS dalam Perundingan Israel-Palestina	45
3.3.2. Proses Perundingan Damai Arab-Israel	47

Bab IV Pengaruh Lobi Yahudi terhadap Kebijakan Bill Clinton dalam konflik Israel-Palestina	
4.1. Kebijakan AS terhadap Konflik Israel-Palestina	55
4.1.1. Kebijakan AS yang Hipokrisi	56
4.1.2. Kebijakan AS terhadap Israel dan Palestina	58
4.1.2.1. Kebijakan Partai Republik dan Partai Demokrat	60
4.1.2.2. Kebijakan George Bush	61
4.1.2.3. Kebijakan Bill Clinton	64
4.2. Kekuatan Lobi Yahudi	
4.2.1. Pengaruh Lobi Yahudi pada Bidang Pemerintahan	69
4.2.2. Pengaruh Lobi Yahudi pada Pemerintahan Bill Clinton	73
4.2.2.1. Dukungan Lobi Yahudi terhadap Pemerintahan Bill Clinton	74
4.2.2.2. Dukungan Bill Clinton terhadap Israel	76
4.2.3. Pengaruh Lobi Yahudi dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina	78
Bab V Kesimpulan	82
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya tulisan ini. Tulisan yang membahas tentang **Pengaruh Lobi Yahudi terhadap Konflik Israel-Palestina (Studi Tentang Kebijakan pada Masa Pemerintahan Bill Clinton)**.

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak atas dukungan dan bantuannya kepada penulis, antara lain:

1. Drs. Soekron Sjah, SU. dan Drs. A. Habibullah, MSI., yang telah membimbing dan membantu sehingga terselesaikannya tulisan ini.
2. Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dosen Wali dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Semua dosen dan staff pengajar pada Fisip Universitas Jember.
4. Seluruh civitas akademika Fisip Universitas Jember
5. Petugas perpustakaan Fisip dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
6. The members of "Bangliga", Eri, Eni, Bowo, Murphy, Ida, dan Leli; *"Thank's for drive me crazy, girls!!!"*
7. I'i, yang selalu menemaniku dalam kesendirian.
8. Teman sejawat, Tiga Roda 'plus' & Three Mush Kuseer, thank's atas

- kebersamaannya dan tetap kompak.
9. Mas, Mbak dan Adik-adik seperguruan di PPS Betako Merpati Putih, atas persaudaraan dan perhatiannya.
 10. Mbak Nanik, atas kegembiraan kita selama ini.
 11. Mas Yanto dan keluarga, terima kasih atas tumpangannya selama hunting di Jakarta.
 12. Teman-teman HI '95, tanpa terkecuali.
 13. Seluruh teman-teman yang telah mengenalku.
 14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai pemula tentunya banyak kekurangan yang terdapt dalam tulisan ini. Karena itulah, penulis membuka diri atas saran dan kritikan terhadap tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat berguan bagi para pembacanya.

Jember, Mei 2000

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Alasan Pemilihan Judul

Proses perdamaian Timur Tengah yang sekarang sedang berjalan relatif cukup cepat, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik global dalam beberapa tahun terakhir. Usainya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet, reunifikasi Jerman dan kemunculan Amerika Serikat sebagai superpower politik dan militer tunggal, langsung atau tidak langsung berpengaruh besar terhadap proses perdamaian Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina harus mendapat penyelesaian yang lebih cepat.

Bila kemudian sekarang terlihat bahwa AS menjadi tumpuan satu-satunya bagi pihak-pihak yang bertikai untuk memperoleh pemecahan, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam realitas politik internasional memang hanya AS sajalah yang memegang kartu-kartu kunci bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina.¹

Posisi AS dalam sengketa Israel-Palestina ini menunjukkan keterlibatan intensif kepentingan-kepentingan AS yang terjalin dengan kepentingan-kepentingan kedua pihak yang terlibat dalam sengketa itu, sehingga politik AS nyaris macet dan prakarsa yang diusulkan terbatas sekali. Hal ini karena secara de facto AS mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk merundingkan tuntutan-tuntutannya, tetapi AS tidak mengenakan sanksi-sanksi berat terhadap salah satu pihak, khususnya dalam hal ini pada pihak Israel. Kenyataan ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa secara diplomatis, politis, dan psikologis, Israel

¹ M. Amien Rais (ed.), Prospek Perdamaian di Timur Tengah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm:vii

tetap pada posisi yang paling *favourable* untuk mencapai beberapa target atau tujuan perdamaian yang paling menguntungkannya.

AS mempertahankan peranan kunci dalam kontrol dan pemerasan Israel atas wilayah-wilayah yang dikuasai—Tepi Barat, Jerusalem Timur, Jalur Gaza, Lebanon Selatan, dan Dataran Tinggi Golan—yang kesemuanya adalah tanah milik Bangsa Arab. Pemerintah AS terus memberikan dukungan finansial, diplomatik, dan militer sementara Israel terus melanggar hukum-hukum internasional, menjalankan pemerintahan militer yang keras dan seringkali brutal atas hampir dua juta bangsa Arab.²

Apalagi sejak berkuasanya Bill Clinton dari Partai Demokrat sebagai presiden yang menggantikan George Bush dari Partai Republik kemungkinan keberpihakan AS kepada Israel akan lebih besar. Seperti telah diketahui bahwa Partai Demokrat lebih pro Israel dibanding Partai Republik karena mayoritas masyarakat Yahudi di AS lebih condong berpihak ke Partai Demokrat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa lobi Yahudi AS telah menyumbang tidak kurang dari 23 juta dollar bagi keperluan kampanye Pemilu Bill Clinton dan bahwa sekitar 80% orang Yahudi AS memang berada di pihak Demokrat. Sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan AS di Timur Tengah akan tetap berpihak pada Israel.

Pemerintahan Bill Clinton sangat transparan dalam sikapnya yang pro Israel. Ia memandang masalah konflik Arab-Israel sebagai “suatu ancaman terhadap eksistensi Israel”. Israel merupakan sebuah negara demokrasi yang kuat, sebuah simbol kemerdekaan dan sebuah oasis kebebasan.³

² Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hlm : 9

³ M. Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm: 41

Kecenderungan AS yang lebih memihak kepada Israel dalam konfliknya dengan negara-negara Arab dikarenakan AS mempunyai hubungan yang unik dengan Israel. Persekutuan yang unik tersebut didasarkan pada persamaan nilai-nilai budaya Yudea-Kristiani. Rakyat Amerika dapat mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Israel yang demokratis dan terbuka. Disamping itu persamaan persepsi sumber ancaman yaitu Uni Soviet, membantu mengembangkan hubungan yang unik tersebut.⁴

Kecenderungan mekanisme dan politik AS di Timur Tengah masih dipengaruhi oleh lobi Israel di Washington. Karena pertimbangan-pertimbangan politik domestik sangat mempengaruhi formulasi dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Sekitar 6,5 juta warga negara AS keturunan Yahudi rata-rata aktif dalam kegiatan politik dan mereka menaruh perhatian besar terhadap setiap perkembangan di Timur Tengah.

Kekuatan lobi Yahudi dalam pemerintahan AS telah menguasai dan mempengaruhi para pejabat dan lembaga pemerintahan dengan sentimen pro Israel. Seperti misalnya anggota kongres dikuasainya dengan jalan memberi dukungan dana, media massa pada waktu pemilihan di distriknya. Sedangkan dalam birokrasi seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, posisi lobi Yahudi telah merasuk dengan membentuk jaringan diantara para pejabat. Demikianlah upaya lobi Yahudi untuk mempengaruhi penentuan kebijaksanaan politik luar negeri yang membidangi Timur Tengah. Sehingga pemerintah AS dibuatnya untuk selalu menoleh ke lobi Yahudi atau paling tidak mengambil kebijaksanaan yang tidak merugikan Israel.

⁴ Amien Rais, Timur Tengah dan Krisis Teluk, Sebuah Analisa Kritis, Amarpress, Yogyakarta, 1990, hlm : 6

Akibat buruknya jauh melampaui beban finansial dan ekonomi yang tercipta karena pemerintah AS terus menyumbangkan bermilyar-milyar dolar setiap tahun kepada Israel dan menghamburkan hasil pajak serta perdagangan untuk kepentingan negara itu. Konsekuensi terburuknya terletak pada kolusi AS dalam pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang mengerikan dan berlangsung lama, yang dilakukan Israel dalam skala luas.

Disamping bangsa Arab yang menderita, kerugian utama dari kolusi ini adalah nama baik Amerika di Timur Tengah. Rasa hormat kepada Amerika Serikat—yang pernah tertanam dalam-dalam dan tersebar luas di kalangan bangsa Arab maupun Israel—tercampak sia-sia akibat ambisi para politisi AS memalukan dan tak habis-habisnya demi memenangkan simpati kelompok-kelompok pro Israel.

Diantara begitu banyak kelompok pro Israel, tidak ada yang diorganisasi secara lebih baik, lebih aktif, atau lebih kuat dibanding AIPAC (*American-Israeli Public Affair Committee*) atau Komite Urusan Publik Israel-Amerika, lobi utama yang mendukung Israel di AS sejak 1951.⁵ Pengaruh organisasi tersebut tidak hanya terbatas pada anggota kongres tetapi juga telah menembus birokrasi pemerintah dan Gedung Putih, selain itu mereka juga telah menguasai media massa, perbankan, hukum, pembuatan film, jaringan radio dan televisi.

Dengan kekuatan ini lobi Yahudi berhasil mengontrol politik luar negeri AS terhadap Israel. Komite Urusan Publik Israel-Amerika ini berhasil mengontrol Kongres (Capitol Hill), terutama Komite Urusan Luar Negeri yang membidangi Timur Tengah. Hampir seluruh anggota kongres mentaati perintahnya, sebab umumnya mereka menganggap AIPAC sebagai representasi langsung di Capitol Hill dari sebuah

⁵ Paul Findey, Op. Cit., hlm: 145

kekuatan politik yang bisa membuka dan menutup peluang-peluang mereka pada waktu pemilihan anggota kongres.

Terhadap kepentingan Israel, AIPAC memang merupakan kelompok lobi yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan informal dari pemerintahan Israel, karena kegiatannya selalu berorientasi pada kepentingan Israel sehingga apa yang diperjuangkan AIPAC dalam kongres merupakan perjuangan untuk mendukung eksistensi Israel.

Kolusi antara Amerika-Israel tampak jelas dalam standar ganda yang diterapkan pemerintah AS dalam pelaksanaan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan masalah Timur Tengah.

Nama baik AS terancam bahkan di Israel sendiri, di mana semakin banyak warganya yang beranggapan bahwa penerapan standar ganda AS merupakan penghalang bagi perdamaian. Mereka percaya bahwa dengan tidak adanya aliran bantuan finansial dan militer tanpa syarat dari Amerika Serikat, pemerintah mereka sejak jauh-jauh hari pasti telah menarik pasukannya dari wilayah-wilayah pendudukan dan menjalin hubungan yang normal dan damai dengan negara-negara Arab.

Kesulitan AS akan semakin menjadi beban dan ancaman ketika konflik Israel-Palestina semakin meningkat, dengan tidak adanya perdamaian. Pusat konflik itu adalah pertemuan antara pengaruh-pengaruh agama, ekonomi, politik, dan militer yang kompetitif, yang kesemuanya menyangkut kepentingan-kepentingan vital AS. Kepentingan-kepentingan itu menganggangi dua pihak dan tidak dapat dicapai hanya dengan berpihak pada bangsa-bangsa Arab atau Israel saja.

Untuk menjaga kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut secara efektif, pertama-tama AS harus mengatasi dua penghalang besar yang keduanya bersumber dari dalam negeri AS. Pertama, pengaruh besar yang dilancarkan oleh kepentingan-kepentingan pro Israel dalam perumusan kebijaksanaan AS di Timur Tengah. Kedua,

topeng buatan yang secara polos dianggap oleh hampir semua orang Amerika sebagai Israel yang sejati. Para pendukung Israel memanfaatkan citra yang menyesatkan itu dengan sangat tangkas dalam program mereka untuk mempertahankan kolusi AS-Israel.

Jalan menuju suatu perdamaian yang adil di wilayah itu tidak mungkin tampil dalam fokus yang jelas sebelum citra rekaan mengenai kebijaksanaan AS di masa mendatang harus didasarkan atas realitas, bukan omong kosong. Mereka harus mempertimbangkan informasi yang paling lengkap dan akurat yang ada, termasuk profil yang tak memihak tentang Israel.

Dengan latar belakang yang demikian inilah penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul :

**"Pengaruh Lobi Yahudi terhadap Konflik Israel-Palestina
(Studi tentang Kebijakan Politik dan Ekonomi AS pada Masa
Pemerintahan William Clinton)".**

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk membuat pembahasan yang seksama, perlu adanya pembatasan tertentu dalam pembahasan, sebab ruang lingkup pembahasan dalam suatu tulisan mempunyai arti penting. Maksud penulis membatasi masalah ini adalah agar masalah tidak terlalu luas atau menyimpang dari tujuan.

Menurut Kartini Kartono, pengertian ruang lingkup pembahasan adalah sebagai berikut :

Untuk pembahasan suatu masalah sangat terkait dengan adanya limit pengongkosan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga, dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interelasi persoalan.⁶

⁶ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 1986, hlm:55

Dalam menyelesaikan permasalahan ini penulis menggunakan batasan waktu dan materi. Batasan waktu yang digunakan adalah pada masa pemerintahan Bill Clinton pada tahun 1992-2000. Dimana pada 1992, Bill Clinton dari partai Demokrat yang sangat pro Israel berhasil menang atas George Bush dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden AS pada saat itu. Keberhasilan Clinton mendapatkan kursi Presiden tersebut tidak luput dari pengaruh lobi Yahudi dalam mempengaruhi anggota Kongres AS yang lebih banyak memberikan dukungannya kepada Partai Demokrat daripada Partai Republik.

Pada masa jabatan Clinton yang kedua yaitu yang dimulai tahun 1996, juga menjadi bukti nyata pengaruh dari kebijakan Clinton terhadap proses perdamaian di Timur Tengah. Pemilihan Presiden dan pemilu yang saat itu diadakan oleh Kongres AS sedikit banyak mempengaruhi sikap pemerintah Israel pada saat itu, dibawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu dari Partai Likud yang berhasil terpilih pada tahun itu juga. Partai Likud yang bersikap sangat keras terhadap proses perdamaian di Timur Tengah akan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintahan Partai Demokrat dibawah Bill Clinton yang sangat konservatif. Betapapun, faktor Lobi pro-Israel yang sangat kuat tidak dapat diabaikan begitu saja. Yahudi Amerika lebih banyak mendukung calon dari Partai Demokrat.⁷

Dibawah pemerintahan Bill Clinton, kaum Yahudi Amerika bisa dikatakan mengalami zaman keemasannya. Selain Cohen, jabatan penting yang dipercayakan kepada Yahudi ialah Menteri Luar Negeri yang dipegang oleh Madeline Albright, Penasehat Keamanan Nasional Samuel Sandy Berger. Penasehat politik Clinton adalah mantan serdadu Israel

⁷ Jawa Pos, 30 Mei 1996

yakni Rahim Israel Emmanuel dan lain-lainnya. Bahkan hampir semua perunding Timur Tengah Amerika adalah Yahudi.⁸

Sedangkan batasan materi yang digunakan adalah cara-cara yang ditempuh lobi Yahudi dalam mempengaruhi kebijaksanaan AS di Timur Tengah yang menggunakan kekuatan para anggotanya dalam Kongres maupun bidang-bidang lain diluar sistem pemerintahan.

Dengan batasan waktu tersebut tidak menutup kemungkinan masuknya data-data diluar batasan yang telah ditentukan, asalkan data-data tersebut masih ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.3. Problematika

Menentukan atau merumuskan masalah adalah sangat penting agar dapat mengatasi dan memecahkan masalah. Winarno Surachmad berpendapat bahwa setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya, bila kita ingin berjalan terus.⁹

Sedangkan menurut Mohammad Hatta, kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam. Masalah berhubungan dengan ilmu. Masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan oleh ilmu. Dan ilmu senantiasa mengemukakan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.¹⁰

⁸ Suara Hidayatullah, Juli 1997

⁹ Winarno Surachman, Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, CV. Transito, Bandung, 1970, hlm: 33

¹⁰ Mohammad Hatta, Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1978

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana pengaruh lobi Yahudi terhadap kebijakan presiden Bill Clinton dalam konflik Israel-Palestina ?"

1.4. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Teori membantu kita menjelaskan dan meramalkan fenomena politik dan juga membantu membuat keputusan praktis.

Mc Cain dan Segal mendefinisikan teori sebagai serangkaian statement yang saling berkaitan.... (yang terdiri dari):¹¹

2. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep dasar teori itu,
3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain;
4. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesa).

Dalam proses eksplanasi selanjutnya, untuk membantu mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti, penulis menggunakan konsep Lobi Yahudi dan konsep Politik Luar Negeri.

Lobi Yahudi secara konseptual berasal dari kata *lobi* dan *Yahudi*. Lobi atau *Lobbying* adalah suatu usaha untuk mempengaruhi keputusan dari pejabat pemerintahan agar keputusan yang dibuat sesuai dengan kepentingan kelompoknya.

¹¹ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. LP3ES, Jakarta, 1994, hlm:187

Suatu kelompok yang berusaha memajukan kepentingannya dengan menekan pembuat keputusan atau pejabat lainnya disebut sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Anggota dari kelompok ini mengemukakan tujuannya secara garis besar pada masalah-masalah yang kontroversial seperti aborsi, hak asasi manusia, lingkungan, politik luar negeri, pengawasan senjata dan energi nuklir.¹²

Yahudi adalah keturunan dari orang-orang Semit yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, yang berada dan tinggal di Palestina sejak 1200 SM sampai 70 M dan kemudian menyebar ke berbagai negara diantaranya diseluruh jazirah Arab, Asia, Eropa, dan Amerika.¹³

Jadi, Lobi Yahudi dapat diartikan sebagai usaha perlobian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Khusus di negara AS, meskipun jumlah Yahudi Amerika hanya 3% dari seluruh penduduk disana (pada 1995) yaitu sekitar 6,5 juta jiwa yang tersebar di kota-kota besar,¹⁴ tetapi pengaruh mereka sangat kuat. Hal ini dikarenakan mereka selalu bekerja keras dan selalu ingin menjadi orang nomor satu di bidangnya. Etos semangat semacam inilah yang menyebabkan mereka kuat belajar dan tahan banting dalam proses pematangannya.

Sedangkan politik luar negeri merupakan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan pemerintah asing beserta perwakilan nasional dan internasional mereka.¹⁵ Menurut pendekatan system, proses politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme bagi suatu system politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya

¹² *The World Book Encyclopedia*, Vol: 12, World Book Inc., USA, 1988, hlm:408

¹³ Clarence L. Barnhart & Robert K. Barnhart (ed.), *World Book Dictionary Vol: 1*, World Book Inc., Chicago, USA, 1988, hlm:1132

¹⁴ Fuad bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'i, *Yahudi dalam Informasi dan Organisasi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm: 43

¹⁵ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm : 200

dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya.¹⁶ Lebih lanjut Graham T. Alison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri.¹⁷

1. Model I : AKTOR RASIONAL.

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan politik luar negeri ini digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi dalam menetapkan alternatif-alternatif yang ada. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa.

Asumsi tentang perilaku pemerintah yang monolit, perilaku menetapkan pilihan secara rasional dan bertujuan jelas itu dan asumsi tentang tersedianya informasi merupakan kelemahan model ini karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Asumsi-asumsi itu mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokrasinya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam system demokrasi, politik luar negeri tidak pernah lepas dari tuntutan politik domestik.

¹⁶ Mochtar Mas' oed, Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analitis dan Teorisasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm : 115

¹⁷ Graham T. Alison dikutip dalam Mochtar Mas' oed. Op. Cit. hlm: 234

2. Model II : PROSES ORGANISASI.

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses mekanis*. Yaitu, pembuatan keputusan dilakukan dengan merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu.

3. Model III : POLITIK BIROKRASI

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi yang melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (*bargaining games*) di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dapat dikatakan bahwa pembuatan politik luar negeri dalam model ini adalah *proses sosial*. Karena model III ini menekankan bargaining games sebagai penentu politik luar negeri, dalam mempelajari politik luar negeri kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan, dan manuver dari pemain-pemain yang terlibat didalamnya.

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan diatas, maka teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah pengambilan keputusan sesuai dengan model I yaitu *Aktor Rasional*. Karena disini penulis akan membahas mengenai kebijakan yang diambil Bill Clinton dalam Konflik Israel-Palestina, dimana Bill Clinton yang berasal dari Partai Demokrat sangat pro Israel dan dalam hal ini ia berperan sebagai aktor tunggal yang membuat kebijakan luar negeri yang diberlakukan di Timur Tengah.

Namun kebijaksanaan AS terhadap Timur Tengah selalu dapat dipengaruhi oleh kekuatan lobi Yahudi dalam Kongres AS sehingga pemerintah AS selalu membabibuta dalam mengekor politik agresi dan teror yang diterapkan oleh Israel di Timur Tengah, dan tindakan ini sebenarnya melanggar jiwa konstitusi AS.

Selain itu kuatnya tekanan dari lobi Yahudi terhadap pemerintahan Bill Clinton agar memberikan konsensi atau toleransi besar terhadap politik luar negeri Israel. Jika Lobi Yahudi di AS benar-benar kuat dan mampu memberikan tekanan politik terhadap pemerintahan Bill Clinton maka, dapat dipastikan AS akan bersikap cuek saja terhadap kebijaksanaan politik luar negeri Israel -apapun bentuknya- terhadap perdamaian Timur Tengah

1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan yang bersifat sementara untuk tingkah laku, kejadian atau peristiwa yang sudah dan akan terjadi.

Menurut Fred N. Kerlinger (1973), hipotesis didefinisikan sebagai : Pernyataan sebagai terkaan mengenai hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada hakekatnya, hipotesis itu mempunyai kontrol dari keseluruhan penelitian (termasuk subyek, instrumen, perencanaan, prosedur, analisis, dan kesimpulan). Hipotesis kemungkinan menyatakan hubungan antara perbedaan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih dengan pernyataan yang singkat, jelas, dan tidak banyak interpretasi.¹⁸

Untuk memberikan jawaban sementara yang dikemukakan oleh penulis dalam masalah ini, hipotesis yang dapat diambil adalah :

Semakin kuatnya lobi Yahudi mempengaruhi kebijakan AS dalam konflik Israel-Palestina, akan sangat mempengaruhi kelancaran

¹⁸ Fred N. Kerlinger dikutip dalam Drs. Sumanto, M.A., Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Andi Offset, 1995, hlm : 55

proses perdamaian diantara kedua pihak, karena AS sebagai penengah dinilai terlalu berpihak kepada Israel.

1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan

Suatu penelitian senantiasa memiliki tujuan pokok, yaitu ingin menerangkan fenomena. Dan untuk memahami fenomena itu, peneliti harus mengembangkan fenomena tersebut dengan fenomena yang lain. Selanjutnya untuk mengetahui fenomena yang satu dengan yang lainnya diperlukan data-data untuk dianalisa.

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa

Usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pencarian data, penulis mengambil data sekunder karena jika penulis menginginkan sumber-sumber yang langsung dari obyek yang diteliti, akan terbentur pada persoalan letak geografis, bahasa, dan sifat kerahasiaan negara atau lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang terpenting.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalam pengumpulan data ini, penulis mengambil data-data dari buku-buku teks, ensiklopedia, buletin, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

¹⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm :

Bahan atau sumber tersebut diperoleh dari :

- ◆ Perpustakaan Daerah Jawa Timur di Surabaya
- ◆ Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- ◆ Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- ◆ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta

1.6.2. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa masalah yang dibahas, penulis menggunakan cara berpikir reflektif, yaitu menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif.

Metode deduktif merupakan penyelidikan yang didasarkan atas azas-azas yang umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus atau penjelasan-penjelasan yang teoritis yang umum atas fakta-fakta yang konkrit.²⁰ Sedangkan metode induktif menggunakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau konkrit.²¹

1.6.3. Pendekatan

Dalam masalah ini penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu : pendekatan sejarah dan pendekatan politik. Pendekatan pendekatan sejarah atau para peneliti terutama berkaitan dengan kisah peristiwa yang muncul secara berurutan, atau sebagai upaya untuk menciptakan kembali suatu penggalan sejarah dalam mengejar jawaban pertanyaan "mengapa".²²

Kebijakan AS dalam konflik Israel dan Palestina dinilai terlalu barat sebelah. AS cenderung berpihak kepada kepentingan Israel.

²⁰ Cheppy Hari Cahyono, *Ensiklopedi Politika*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm:87

²¹ *Ibid*, hlm : 151

²² Jack Plano, *Op. Cit.*, hlm : 104

Terbukti dengan sikap AS yang tidak pernah memberikan sanksi apapun terhadap pelanggaran Israel dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Tetapi AS selalu menekan pihak Palestina dalam perundingan tersebut.

Tanpa ketegasan sikap dari AS, mereka selalu mendukung sikap Israel yang terus memperluas pemukiman Yahudi di daerah pendudukan yang seharusnya menjadi hak Palestina.

Keberpihakan AS tersebut diakibatkan adanya hubungan yang unik antara AS dan Israel. AS menjadikan Israel sebagai sekutu strategis di Timur Tengah untuk melancarkan kepentingannya di kawasan tersebut karena Israel dinilai negara paling kuat di kawasan itu yang dapat dijadikan basis perlindungan AS dari negara-negara Arab yang dinilainya radikal.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOBI YAHUDI

2.1. Latar Belakang Terbentuknya Lobi Yahudi

Diawali dengan gerakan kaum Yahudi yang disebut zionisme, masyarakat Yahudi ingin mengadakan kembali negara mereka sendiri. Zionisme adalah suatu gerakan politik rasial yang percaya bahwa ras Yahudi adalah ras yang paling tinggi tingkatannya di muka bumi. Selain Yahudi adalah binatang yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang zionis. Gerakan ini memiliki ambisi untuk menguasai seluruh dunia dengan perantaraan satu pemerintah dunia yang berpusat di Israel.

2.1.1. Berdirinya Zionisme Israel

Gerakan Zionisme pertama kali dicetuskan oleh Theodore Herzl, gerakan ini ingin membentuk kembali negara Israel. Gerakan yang muncul pada abad ke-8 ini mengklaim Palestina sebagai tanah air orang Yahudi dan menganjurkan agar orang Yahudi di negara-negara lain kembali ke tanah air ini.

Pada 1897 diadakan Kongres Zionisme yang pertama. Sejak itu zionisme memasuki gelanggang politik. Zionisme lebih menitikberatkan corak kebangsaannya, sedangkan organisasi Yahudi lainnya hanya mendasarkan kesatuan kaum Yahudi pada agama mereka.¹

Pada mulanya para penganutnya tidak mengetahui kalau mereka akan mendirikan suatu negara. Inggris yang saat itu menjajah Palestina, mengusulkan supaya organisasi-organisasi Yahudi itu mengadakan koloni mereka di Kenya (1903), tetapi usul itu ditolak oleh Kongres Zionisme

¹ Ensiklopedi Indonesia, hlm : 1512

(1905). Kongres ini memutuskan bahwa kolonisasi kaum Yahudi itu akan diadakan di Palestina dan sekitarnya, sesuai dengan warisan Perjanjian Lama dari kitab Injil Kuno.

Selain itu, pada saat Perang Dunia I, Inggris melihat bahwa Palestina sangat vital bagi negara-negara Barat, khususnya bagi Inggris sendiri. Karena itu Inggris merubah politiknya dengan menyetujui Palestina dijadikan sebagai national home bagi warga Yahudi.

Sejak meninggalnya Herzl, pemikiran zionisme jatuh ke tangan Chaim Weizman yang bisa mengambil hati pemerintah Inggris dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Inggris dengan diberikannya Deklarasi Balfour pada 2 Nopember 1917 yang menjanjikan suatu negara kebangsaan kepada orang-orang Yahudi.

Pernyataan Lord Arthur Balfour atas nama Ratu Inggris kepada Lord Rothschild, wakil Yahudi di London itu berbunyi, "Pemerintah Ratu Inggris menyaksikan dengan senang hati cita-cita untuk mendirikan suatu "Nasional Home" di Palestina untuk orang-orang Yahudi dan akan menggunakan ikhtiar sebaik-baiknya untuk mempercepat maksud tersebut, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu yang merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan atatus politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di setiap negeri lain".² Pernyataan itu didukung pula oleh Perancis, Italia dan Rusia.

Dalam gagasan pemula-pemula Yahudi, cita-cita Zionisme itu bukanlah semat-mata terbentuknya negara Israel di Palestina dimana orang-orang Yahudi yang tertindas diseluruh dunia dapat pulang ke tanah air dan negara mereka, tetapi jauh daripada itu, mereka menuliskan suatu "negara besar" yang batasnya sebelah barat yaitu Sungai Nil, termasuk separuh negeri Mesir dan sebelah timur batasnya ialah Sungai Eufrat

² Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Mizan, Bandung, 1995, hlm: 26

sampai ke kota termasuk Madinatul Munawarah, sebab dahulu kala di negeri itu hidup suku Bani Nadhir dan Bani Quraizah yang menjadi nenek moyang kaum Yahudi.³

Perkembangan masyarakat Yahudi ditentang golongan Arab. Setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris memihak tuntutan imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina. Hal ini menimbulkan pemberontakan, sehingga pemerintah Inggris terpaksa membawa persoalan tersebut ke depan Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada tahun 1947, PBB menerima rencana pembagian suatu negara Palestina. Segera setelah itu timbul pertentangan antara masyarakat Arab dan Yahudi. Tokoh-tokoh pimpinan masyarakat Yahudi menyatakan berdirinya suatu negara Israel pada 14 Mei 1948. Pasukan Inggris terakhir meninggalkan tanah Palestina tanggal 15 Mei 1948, pada hari itu juga Israel diserang tujuh negara Arab. Awal 1949 berlangsung gencatan senjata dengan Mesir, Libanon, Yordania dan Syiria. Sementara itu Israel telah berhasil memperluas wilayahnya melebihi bagian seperti yang direncanakan PBB.

2.1.2. Peristiwa Holocaust dan Pengaruhnya

Peristiwa Holocaust merupakan pembantaian yang dilakukan terhadap sekitar enam juta orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman setelah Perang Dunia I. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari kebencian Nazi terhadap orang-orang Yahudi yang dianggap pembawa warisan genetik yang dapat merusak nilai-nilai bangsa Jerman sebagai keturunan bangsa Aria.

Para Penganut Nazi yang fanatik menganggap bahwa Orang Yahudi sebagai penyebab dari semua kesulitan yang dialami Jerman setelah kekalahannya dari Sekutu pada Perang Dunia I. Kebencian Hitler sebagai

³ Imam Munawwir, Kebangkitan Islam dan Tantangan-tantangan yang Dihadapi dari Masa ke Masa, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm : 221-223

pemimpin Nazi terhadap Yahudi dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Mein Kampf*. Dalam buku itu digambarkan bahwa orang Yahudi akan menghancurkan bangsa Aria dengan kelicikannya melalui persekutuan internasionalnya.

Dengan sikap sebagian besar orang Eropa yang demikian itu, Yahudi mengalami pengusiran dan pembantaian di seluruh Eropa. Kebencian Nazi terhadap Orang Yahudi tersebut mengalami puncaknya saat terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi, yaitu saat orang-orang Yahudi dibawa ke kamp kematian di Auschwitz, Dachau dan Buchenwald di Jerman, Chelmno, Majdenek dan Treblinka di Polandia. Mereka dimasukkan dalam ruang tertutup dan disemprot dengan gas beracun hingga mati. Pembantaian itu menewaskan lebih dari enam juta orang Yahudi.⁴

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, peristiwa Holocaust itu menimbulkan simpati dari sebagian orang-orang Eropa khususnya bangsa Jerman kepada orang-orang Yahudi. Untuk menghapus rasa bersalah akibat penganiayaan dan pembantaian Yahudi dalam peristiwa Holocaust tersebut, pers Jerman misalnya suka membesar-besarkan keberanian pasukan Israel dalam perangnya melawan bangsa Arab dengan maksud seolah-olah mengecilkan kebangkitan Yahudi.

Lebih jauh lagi, terdapat unsur-unsur di Jerman yang ingin menampilkan bahwa Nazisme adalah ekspresi manusiawi dalam hubungan antara kalangan mayoritas dan minoritas. Jadi, jika Israel sekarang ini menindas orang-orang Palestina, kemudian adanya Nazisme dapat dipahami. Sehingga pembantaian kaum Yahudi di kamp konsentrasi oleh para Nazi itu menghalalkan adanya pembantaian para pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatila.⁵

⁴ Collier's Encyclopedia, hlm: 198

⁵ Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme, Paramadina, Jakarta, 1996, hlm: 216

Dengan adanya peristiwa Holocaust itu jugalah, Israel membenarkan pendirian negara Israel dan keabsahannya secara mutlak kepada setiap tuntutan politik yang diajukan para pemimpin negara tersebut.

Mereka berpendapat bahwa Holocaust tersebut merupakan persembahan bagi terbentuknya negara Israel sebagai imbalan atas segala penderitaan yang pernah mereka alami, serta selanjutnya mendapatkan bantuan dan sokongan dari negara-negara Eropa yang sama-sama bersalah dan berdosa melakukan kejahatan itu, sehingga orang-orang Eropa tersebut harus memberikan, kepada orang-orang yang selamat dari pembantaian suku bangsa yang dilancarkan Nazi tersebut, tempat untuk dapat hidup berdampingan dengan saudara sebangsanya. Orang-orang Yahudi tersebut menuntut Palestina untuk dijadikan "National Home"-nya.⁶

2.2. Perkembangan Masyarakat Yahudi di Amerika

Pada kenyataannya gerak pindah orang-orang Yahudi sedunia adalah bahwa mereka selalu mengikuti gerak pusat kekuasaan di dunia. Sewaktu Eropa Tengah terkenal dengan kemajuannya, maka orang Yahudi bergerombol disana sehingga dicetuskan rencana Zionis pertama kali oleh Theodore Herzl (1860-1904). Demikian pula ketika pusat dunia itu berpindah ke London dan Paris, misalnya, maka mereka berusaha keras untuk mendekati dan mempengaruhi pusat-pusat kekuasaan di sana. Ketika tampak bahwa masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh AS, yang muncul sebagai raksasa mudah yang baru bangkit di dunia maka mereka juga bergerombol pindah ke sana.

⁶ R. Garaudy, *Zionis Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm: 130-131

Dan begitu jauh pada umumnya upaya mendekati dan mempengaruhi pusat-pusat kekuasaan dunia itu telah berhasil secara mengagumkan. Dari sejarah kita kita juga melihat, hanya didunia Islamlah umumnya bangsa Yahudi kurang berhasil dalam memanipulasi pusat-pusat kekuasaan itu.

Pada mulanya Zionisme Amerika muncul dari kaum borjuis Yahudi yang ada di Amerika. Mereka menjadikan Zionisme sebagai suatu ideologi, praktek politik dan suatu system organisasi. Pada waktu itu suasana internasional mengalami peralihan dari periode kapitalisme ke imperialisme. Dimana saat itu AS menjadi negara kapitalis terbesar di dunia sehingga hubungannya dengan zionisme internasional sangat dekat, karena para kapitalis AS telah melahirkan kaum borjuis Yahudi di AS. Dan aktifitas para zionis sangat bergantung pada monopoli kaum borjuis Yahudi Amerika itu. Atau dengan kata lain, keberadaan AS sebagai kapitalis terbesar didunia menjadi asal usul Yahudi.

Kaum borjuis Yahudi di AS bukanlah kelompok yang tertutup, terisolasi dan mereka juga sangat terikat dengan lingkungan monopoli AS sehingga hubungan mereka sangat dekat. Akibatnya, para zionis memiliki kekuatan ganda, yaitu sebagai perwakilan atas kepentingan mereka dalam mengontrol kebijakan AS dan sebagai bagian dari zionisme internasional yang mempunyai ikatan dengan para zionis di seluruh dunia.

Pertumbuhan sosial dan ekonomi di AS pada abad 19 mendukung asimilasi Yahudi. Setelah AS merdeka, masyarakat Yahudi mendapat persamaan hak seperti warga lainnya. Karena itu AS memberikan "tanah yang dijanjikan" kepada banyak warga Yahudi Eropa saat terjadi pengungsian untuk mendapatkan pemukiman di AS. Sampai awal abad 19 di AS terdapat lebih dari 10.000 orang Yahudi, terutama Sephardim, keturunan Yahudiyang keluar dari Spanyol dan Portugis pada abad 15-16; kemudian diikuti periode imigrasi dari Jerman dan akhir abad 19 dari

Eropa Timur. Populasi Yahudi AS bertambah dari 230.000 pada 1880 menjadi 3.400.000 pada 1917.⁷

Pada abad 19, kaum nasionalis borjuis Yahudi yang berasal dari para imigran mulai mendirikan institusi masyarakat Yahudi yang beranggotakan para imigran dan warga Amerika yang setia kepada Yahudi (masyarakat Yahudi Amerika merupakan cabang dari jaringan yang mempunyai hubungan yang sangat dekat secara agama, politik, budaya, pendidikan dan organisasi yang menyatukan warga Amerika sebagai asal-usul Yahudi). Institusi tersebut sebagian besar kepemimpinannya dipegang oleh kaum borjuis Yahudi yang secara substansial kedudukannya sangat kuat pada ekonomi AS pada saat itu.

Kaum proletariat Yahudi di Amerika mulai berkembang pesat pada akhir abad 20. Kemudian kaum borjuis (khususnya imigran dari Jerman) mulai mengkonsolidasikan dominasi mereka dalam institusi masyarakat, ratusan ribu imigran dari Eropa Timur yang bergabung dengan tentara dalam kelas pekerja Amerika mulai melawan kapitalis, termasuk para kapitalis Yahudi. Hal ini diakibatkan karena perbedaan kelas dalam masyarakat Yahudi Amerika.⁸

Adanya perang kelas ini dijadikan alasan yang kuat untuk memasukkan zionisme sebagai ideology utama untuk menyatukan masyarakat Yahudi AS. Slogan "*Unity of World Jewry Around Zion*" diproklamasikan oleh para Zionis saat terjadi transisi dari kapitalisme ke imperialisme yang ditujukan untuk melindungi kaum borjuis dan diikuti usaha untuk memisahkan pergerakan kelas pekerja dan subordinat masyarakat pekerja Yahudi secara ideology, politik dan ekonomi.

Keinginan kaum borjuis Yahudi Amerika untuk berkembang secara luas dalam perekonomian Amerika dihalangi oleh anti semitisme di AS sejak akhir abad 19. Para borjuis Yahudi meminta dihentikannya arus

⁷ Sergey Sergeev, *Some Specifics of Zionism in The USA*, dalam *Zionism: Past and Present*, Social Sciences Today, 1976, hlm: 45

⁸ *Ibid*, hlm: 46

imigrasi ke Amerika dan memindahkan arus imigrasi ke beberapa negara lain sebagai perlawanan terhadap anti semitik. Oleh karena itu mereka mendukung imigrasi Yahudi ke Palestina.

Organisasi Zionis Amerika didirikan pada 1898. Hampir 100 klub, perkumpulan dan kelompok nasionalis Yahudi tergabung didalamnya, memiliki tiga sekolah zionisme yang didirikan pada tahun tersebut. Mereka mengadakan kongres yang pertama pada 4 Juli 1898 di New York. Kongres tersebut dihadiri oleh anggota dari Hoveve Zion (pecinta zion) dan kelompok lain yang mendukung zionisme Herzl, perwakilan kongregasi ortodok agama zionis dan juga para pengikut Theodore Herzl.⁸

Sebelum Perang Dunia I, organisasi Yahudi telah memiliki dasar yang kuat, dibukanya cabang-cabang organisasi, diadakannya pelatihan kader zionis dan mengadakan hubungan dengan masyarakat Yahudi dan organisasi Nasional Amerika.

Agen zionis beroperasi dalam institusi budaya dan pendidikan seperti *Jewish Publication Society of Amerika* dan *American Jewish Historical Society*, dan juga dalam organisasi pecinta sesama. Namun ketika tidak mendapatkan dukungan untuk zionis, mereka mengubah arah taktik dengan mengubah isu politik dengan permintaan untuk promosi kebudayaan Yahudi dan bantuan kepada masyarakat Yahudi di Palestina.

Selama Perang Dunia I, dalam kampanyenya untuk mendapatkan hak-hak Yahudi di Palestina dan Eropa, para zionis berusaha menarik perhatian banyak warga AS dengan menggunakan slogan dan terminologi zionis yang digunakan dalam institusi masyarakat Yahudi Amerika.

⁸ Ibid, hlm:48

Secara langsung simpati terhadap komunitas Yahudi menjadi dukungan untuk ide "nasional home" di Palestina. Untuk mendapatkan kebebasan bertindak dalam komunitas Yahudi, para zionis bertindak sebagai perwakilan semua Yahudi Amerika.

Seorang tokoh Zionis Amerika Louis Brandeis menyatakan :⁹

" Zionism is not a movement to remove all the Jews compulsorily to Palestine. By supporting Zionism, an American Jew was not necessarily seeking to change his own home, but rather to win for Jews everywhere the freedom to make their home in Palestine or elsewhere. For Jews who did not wish to leave the United States, A Jewish state in Palestine would serve as a centre from which Jewish values radiate and as a spiritual force to preserve Jews from assimilation".

Tumbuhnya keanggotaan organisasi zionis menghasilkan propaganda zionis. Untuk pertama kalinya pergerakan zionis di AS menjadi karakter suatu masyarakat di Amerika. Para zionis mendapat bantuan dana besar-besaran dari kaum borjuis Yahudi Amerika.

Keterlibatan AS dalam Perang Dunia I mempertinggi prestise zionis Amerika diantara kelompok masyarakat di negara tersebut yang mempercayai bahwa akan tercipta negara nasional Yahudi di Palestina yang dipimpin oleh kaum borjuis Amerika. Konsekuensinya AS dapat memperluas ekspansinya di wilayah tersebut. Zionis Amerika menggunakan koneksi mereka dalam pemerintahan AS untuk memainkan peranan penting dalam mengadopsi Deklarasi Balfour yang menjanjikan akan membangun "nasional home" Yahudi di Palestina.

⁹ Ibid, hlm:50

2.2.1. Perkembangan Pengaruh Zionisme di Amerika

Kampanye yang dilakukan para zionis untuk mencari dukungan Washington terhadap masalah Palestina mendapat tanggapan yang baik dari para tokoh politik yang menilai bahwa rencana Zionis tersebut dapat memperkuat posisi AS di Timur Tengah.

Hasil dari tekanan Zionis tersebut sangat berpengaruh pada program politik luar negeri dua partai besar AS. Pada pemilu 1944, Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka menyetujui pembukaan Palestina sebagai daerah yang terbuka bagi para imigrasi dan kolonisasi dan mendirikan negara persemakmuran Yahudi yang bebas dan demokratis.

Empat tujuan utama dari aktivitas Zionis Amerika selama 25 tahun adalah memberikan bantuan dana dan moral kepada Israel; memberi doktrin kepada opini publik Amerika dalam semangat zionis; hubungan langsung dengan pembuatan keputusan AS dengan tujuan mengatur segala tindakan AS dan Israel; anti Soviet dan anti komunis.

Para Yahudi Amerika juga mengumpulkan dana untuk Israel dan memainkan peran aktif dalam kampanye pro-Israel dan anti Soviet. Dalam mendukung politik luar negeri Israel, ZOA (Zionism Organisation of America) tidak hanya menggunakan isu pemukiman di Timur Tengah tetapi juga isu hubungan Soviet-AS. Mereka berhubungan dengan departemen-departemen negara AS, kongres dan banyak ahli politik dan perwakilan monopoli AS dan menerima bantuan militer AS dari Pentagon.

Dalam beberapa tahun setelah perkembangan pengaruh zionis, "religious Zionists" tidak hanya mencuci otak kaum Yahudi Amerika tetapi juga berusaha memperluas dukungan diantara organisasi agama Kristen. Pada 1972 mereka mengadakan National Interreligious Consultations on Soviet Jewry, suatu organisasi yang didalamnya



mewakili Protestan (termasuk Negro), Katolik dan gereja Ortodok di AS untuk aktivitas anti Soviet.¹⁰

Kegiatan Zionis tidak hanya berpengaruh pada politik luar negerinya saja tetapi juga pada politik dalam negeri AS. Pengaruh Zionis terhadap Kongres Yahudi Amerika dan Liga Anti defamasi menghasilkan propaganda pada pergerakan hak-hak sipil yang memberi dukungan untuk pemimpin Israel dari kulit hitam. Termasuk dalam melawan rasisme Amerika, Liga Anti Defamasi menuduh orang-orang yang berusaha mengkritik politik Israel dengan menyebut mereka sebagai anti semitik dan fasis.

Dominasi Yahudi sebegitu jauh telah dapat di tegakkan dengan mantap. Meskipun AS adalah suatu negara demokrasi dan demokrasi itu berdasarkan suara terbanyak, tetapi orang Yahudi telah dapat memaksakan pendapatnya kepada rakyat AS meskipun jumlah mereka tidak sampai 10 % dari jumlah penduduk AS.

Kaum Yahudi telah dapat memanipulasi kelemahan-kelemahan dalam system demokrasi dan menguasai aspek-aspek yang mereka anggap penting dalam kehidupan kamasyarakatan pada umumnya dan pada kehidupan politik pada khususnya.

Manipulasi itu dapat dilakukan dengan menguasai faktor-faktor yang sangat menentukan dalam masyarakat terutama dunia keuangan, media massa dan dunia pemikiran termasuk perguruan tinggi. Karena itulah informasi yang disebarakan ke seluruh dunia setiap saat adalah versi yang mendukung atau sekurang-kurangnya tidak merugikan citra Zionisme.

Cara-cara yang digunakan mulai dari cara yang halus, canggih dan berbudaya, sampai kepada cara yang kasar dan bersifat kekerasan. Sedangkan citra pihak-pihak yang dianggap merupakan musuh zionisme,

¹⁰ Ibid, hlm: 66

terutama apa yang berkenaan dengan Islam dan bangsa Arab, dirasakan dalam bentuk yang seringkali sangat keterlaluhan. Kenyataan ini mulai dirasakan orang AS sebagai merusak nilai-nilai agung yang dijunjung tinggi orang Amerika terutama demokrasi itu sendiri.¹¹

2.2.2. Perkembangan Organisasi-Organisasi Yahudi di Amerika.

Perkembangan organisasi Yahudi di Amerika diawali dengan berdirinya *B'nai B'rith Masonic* (perkumpulan rohani *B'nai B'rith*), pada 1843 yang didirikan oleh sekelompok imigran Yahudi dari Jerman. Pada 1898, dibentuk *Federation of American Zionist* (Federasi Zionis Amerika) sebagai pelopor dari *Zionist Organisation of America*. *American Jewish Committee* dibentuk pada 1906, meskipun pada mulanya komite ini memproklamirkan dirinya sebagai organisasi yang non-zionis tetapi tetap saja ia bekerja untuk kepentingan zionis.

Beberapa tahun kemudian tepatnya Juni 1918, diadakan Kongres Yahudi Amerika yang dihadiri oleh semua perwakilan organisasi Yahudi yang ada di Amerika. Dalam kongres itu semua organisasi zionis digabung menjadi satu dan terbentuklah Organisasi Zionis Amerika (ZOA) yang berbasis pada Federasi Zionis Amerika, sehingga ZOA menjadi organisasi terbesar dan paling berpengaruh di AS. Ketika terjadi arus imigrasi besar-besaran dari Eropa, terjadi perbedaan kelas antara kaum borjuis Yahudi dan para imigran yang kemudian melahirkan organisasi pekerja Yahudi Amerika pada 1924.¹²

Masyarakat Yahudi Amerika juga memiliki organisasi wanita yang cukup berpengaruh. Mereka menyebut dirinya *Hadassah*, dimana setelah

¹¹ A. Rahman Zaimuddin, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, vol:2, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm: 8-9

¹² *Sergey Sergejev*, op. cit., hlm: 63

Perang Dunia II menjadi organisasi wanita Yahudi terbesar di AS dengan jumlah anggota lebih dari 300 ribu orang.¹³

Organisasi "Seruan Yahudi Bersatu" yang didirikan pada tahun 1939 merupakan kelompok lobi Yahudi yang paling berpengaruh, organisasi tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 828 juta dolar AS untuk disumbangkan kepada pemerintah Zionis pada tahun 1973.

Kelompok Zionis "Anak-anak Perjanjian" yang didirikan pada 13 Oktober 1943 di New York merupakan kelompok yang terkuat yang berhasil mengembangkan cabangnya ke seluruh penjuru Amerika dan Eropa.¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya organisasi zionis semakin berpengaruh dalam mengatur politik luar negeri AS terutama yang berhubungan dengan masalah Timur Tengah. Apalagi setelah adanya AIPAC (American-Israeli Public Affair Committee) yang pada awalnya dinamakan Dewan Zionis Amerika untuk Urusan Publik. Disamping itu, ada organisasi lobi lain yang sangat mendukung kekuatan perlobian Yahudi di AS, yaitu ADL (Anti Defamasi League of B'nai B'rith) dan PCMJO (President's Conference of Major Jewish Organisation).

Beberapa tahun sebelum munculnya AIPAC sebagai kekuatan utama lobi Yahudi, yang dianggap suara pro-Israel paling kuat di Washington adalah PCMJO yang menghimpun para pemimpin dari 38 kelompok utama Yahudi. Sedangkan ADL yang secara teknis dibawah oleh B'nai B'rith jumlah anggotanya di seluruh dunia mencapai 500 ribu orang (awal 1990-an) dan mempunyai independensi yang besar terbukti mereka mampu membiayai sendiri kegiatannya. Namun sekarang kekuatan mereka kalah jauh dibanding AIPAC.¹⁵

¹³ Ibid, hlm: 61

¹⁴ Fuad Bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'i, Yahudi dalam Informasi dan Organisasi, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm: 44-45

¹⁵ Paul Findley, 1992, *op.cit.*, hlm: 54

Tetapi meskipun begitu mereka tetap bekerja sama, saling tukar menukar informasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menghadapi lawan. Mereka tidak segan-segan memecah dirinya dalam berbagai kelompok tetapi semua pada dasarnya jati dirinya sama yaitu lobi Yahudi. Ketiga organisasi perlobian itu, yaitu AIPAC, ADL dan PCMJO merupakan tiga pilar utama dari organisasi lobi di Amerika yang menjadi tumpuan bagi keberhasilan kaum Zionis dalam menguasai pemerintah AS, media massa, dunia hiburan dan posisi strategis lainnya. Mulusnya kerjasama antara unit-unit lobi Yahudi ini mampu mengefektifkan kegiatan *lobbying* yang mereka lakukan.

Kuatnya pengaruh lobi yahudi di AS tidak hanya terbatas pada kehebatan mereka mengorganisir dirinya sendiri dalam berbagai kelompok Political Action Committee (PACs). Tiga pilar utama, AIPAC, ADL dan PMCJO hanyalah merupakan organisasi induk yang aktif di permukaan. Masih ratusan atau ribuan organisasi lain dalam bentuk "*think tank*" dan berbagai macam LSM. Dengan pola yang demikian ini maka penetrasi kekuatan Yahudi di AS sulit ditandingi.

Disamping organisasi-organisasi yang telah disebutkan, jumlah organisasi Yahudi itu telah mencapai sekitar 340 buah dan setiap warga Yahudi diwajibkan menjadi anggota salah satu dari organisasi itu. Melalui organisasi-organisasi tersebut, dapat terlihat persatuan yang sangat erat sehingga akan tampak Yahudi yang miskin duduk bersebelahan dengan Yahudi miliuner.

Faktor yang menyebabkan lobi Yahudi sangat kuat ialah pertama, masyarakat Yahudi sangat aktif dalam politik; dan kedua, secara individual banyak tokoh Yahudi yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan maupun swasta Amerika. Selain itu, tipe manusia Yahudi Amerika ialah mereka selalu bekerja keras dan selalu ingin menjadi orang

nomor satu di bidangnya. Semangat seperti inilah yang menyebabkan mereka kuat belajar dan tahan banting dalam proses pematangannya.

2.2.3. Perkembangan Pengaruh Lobi Yahudi dalam Pemerintahan AS

Pesatnya perkembangan masyarakat Yahudi di AS juga mempengaruhi kehidupan politik dan pemerintahan negara tersebut. Seperti bangsa-bangsa lain, usaha para imigran Yahudi yang datang ke Amerika tidak begitu berhasil dalam menekan politik luar negeri AS, utamanya keinginan bangsa Yahudi untuk mendirikan pemukiman Yahudi di Palestina.

Dengan kegigihannya, akhirnya mereka berhasil mempengaruhi opini publik AS untuk menyetujui ide mengenai pendirian pemukiman Yahudi di Palestina. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden John Adams pada Oktober 1818 yang menyetujui berdirinya negara Yahudi di Palestina dan perluasan hak-hak istimewa bagi masyarakat Yahudi di seluruh dunia.¹⁷

Sejak saat itu pengaruh Yahudi semakin berkembang dalam kehidupan politik AS seiring dengan muncul dan menyebarnya zionisme di AS. Seperti saat terpilihnya Woodrow Wilson sebagai Presiden AS pada 1912 diperkirakan akibat adanya hubungan antara lobi zionis dan kekuasaan eksekutif di Gedung Putih. Para ahli menghubungkan hal ini dengan penggunaan pengaruh oleh pemimpin Organisasi Zionis, yaitu Louis D. Brandeis yang juga menjabat sebagai penasihat Presiden, kemudian Wilson memberikan posisi penting kepada Brandeis dalam Supreme Court pada 1916.

Pada mulanya Senat menentang pengangkatan seorang Yahudi dalam Supreme Court. Tetapi bagaimanapun akhirnya Senat

¹⁷ Alexander Kislov, *Republican, Demokrat and Zionist Lobby*, dalam *Zionism: Past and Present*, Social Sciences Today, 1976, hlm: 73

menyetujuinya. Bahkan sejak saat itu muncul tradisi yang diikuti oleh semua Presiden AS (kecuali Nixon) bahwa satu dari anggota Supreme Court adalah orang Yahudi.

Setelah Perang Dunia I, lobi Zionis muncul sebagai lobi yang sangat berpengaruh dan berpotensi di Washington. Terbukti dengan dukungan Presiden Wilson dalam koferensi perdamaian Paris dan menyetujui klaim bangsa Yahudi atas Palestina. Presiden Warren Harding yang menggantikan Wilson juga memberikan dukungan moral atas rencana Yahudi itu.

Pada awal tigapuluhan hubungan antara para pemimpin World Zionist Organisation dan para milyuner AS semakin erat, apalagi setelah AS berkepentingan dengan sumber minyak di Timur Tengah. Dengan dukungan Israel tersebut secara finansial, penetrasi AS semakin kuat dalam ekonomi dan posisi strategis di Timur Tengah. Di pihak lain, organisasi Yahudi di AS mengalami banyak perkembangan dan semakin aktif. Sehingga pengaruhnya semakin besar pada kehidupan politik AS.

2.2.4. Perkembangan Pengaruh AIPAC

Seperti yang telah disebutkan bahwa AIPAC merupakan organisasi perlobian yang paling kuat di AS. Diantara begitu banyak kelompok pro-Israel, tidak ada yang diorganisasi yang lebih baik, lebih aktif, dan lebih kuat dibanding AIPAC, Komite Urusan Publik Israel-Amerika, lobi utama yang mendukung Israel di Amerika Serikat sejak 1951. Pada mulanya lobi itu dinamakan Dewan Zionis Amerika untuk Urusan Publik dan diubah namanya pada 1959.¹⁸

¹⁸ Paul Findley, *Diplomasi...*, Op. Cit., hal 145

AIPAC merupakan organisasi Lobi Yahudi yang mempunyai skala luas dalam *field of influence*-nya. Dan merupakan lobi yang paling disegani di kalangan perlobian AS. AIPAC hanya merupakan salah satu bagian dari Lobi Yahudi yang belum terlalu lama munculnya. Tetapi dalam hal pengaruh langsungnya atas kebijakan publik Amerika, AIPAC jauh lebih penting dan berpengaruh. AIPAC merupakan satu-satunya pelobi yang terdaftar resmi di Capitol Hill.

Meskipun dalam segi jumlah keanggotaannya hanya puluhan ribu saja, tetapi pengaruhnya jauh melebihi kekuatan lobi politik manapun yang ada di AS. Di setiap kota besar di AS pasti terdapat cabang-cabang AIPAC yang mempunyai data lengkap anggotanya maupun siapa saja yang menjadi simpatisan.

Pada tahun 1980, AIPAC baru mempunyai staff sekitar 30 orang dan dengan anggaran 1,3 juta dolar. Pada tahun 1985, AIPAC berkembang menjadi organisasi dengan staff 75 orang dan dengan anggaran sebesar 5,7 juta dolar. Anggota resminya berjumlah 51.000 orang dan ditarik iuran sebesar 35 dolar pertahun.¹⁹

Pada 1987, AIPAC telah menjadi kekuatan utama yang telah memperluas dan memperkokoh pengaruhnya sehingga dapat mengontrol Capitol Hill dalam menyusun kebijaksanaan AS di Timur Tengah. Ia adalah lobi etnis paling kuat dalam sejarah Amerika dan pengaruhnya dapat dirasakan bukan hanya di Capitol Hill tetapi juga di Gedung Putih, Pentagon, Kementerian Luar Negeri, Kantor Perbendaharaan Negara dan sejumlah kantor lainnya.

AIPAC juga berhasil dalam isu-isu ekonomi. Ia merupakan organisasi Yahudi yang mampu mempengaruhi Kongres dan Presiden untuk memberikan bantuannya kepada Israel. Keberhasilan pemberian

¹⁹ Paul Findley, *Mereka...*, Op. Cit., hlm: 227

bantuan ekonomi AS kepada Isreal –bahkan saat Presiden menentangnyamelebihi 80%, sehingga bantuan AS tersebut setiap tahun selalu bertambah.

Robert L. Friedman menyatakan AIPAC mempunyai semacam dua unit intelejen rahasia yang dibagi dalam dua bidang tugas. Satu unit bertugas mengumpulkan data lengkap tentang tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh tetapi mempunyai sikap dan opini yang dinilai “miring” terhadap Israel. Unit intelejen lain yang cukup penting dinamakan “*Policy Analysis*” yang bertugas mengolah data yang diperoleh agen-agen AIPAC yang disebarkan di seluruh pelosok negeri dan kemudian memformulasikan suatu kebijaksanaan bagi AIPAC.²⁰

Jaringan pengaruh tersebut sangat penting bagi kepentingan kaum Yahudi pada umumnya dan juga bagi negara Israel. Jaringan pengaruh tersebut diantaranya adalah penguasaan pers AS dan juga penerbitan buletin AIPAC yaitu *Near East Report* dan *Jerusalem Post*. Buletin ini dibagikan gratis kepada media massa, para anggota Kongres, para pejabat penting pemerintah dan orang-orang terpandang dalam kebijaksanaan luar negeri. Sedangkan para anggotanya sendiri memperoleh sebagai bagian dari iuran mereka yang berjumlah 35 dolar pertahun. Selain itu AIPAC mampu menyensor tulisan dan berita tentang sisi buruk dari kaum Yahudi ataupun negara Israel.

Dalam bidang akademis, pada 1973, AIPAC menyelenggarakan Program Pengembangan Kepemimpinan Politik guna melatih para aktifis mahasiswa tentang cara meningkatkan pengaruh pro-Israel di kampus. Hanya dalam waktu empat tahun program AIPAC ini berhasil menghimpun lebih dari 5000 mahasiswa di kampus yang ada di 50 negara

²⁰ Suara Hidayatullah, Juli 1997

bagian. Program tersebut pada dasarnya adalah tujuan untuk menciptakan sentimen pro-Israel dan melawan anti-Israel.

Kekuatan AIPAC telah tumbuh dengan pesat saat diketuai oleh Thomas A. Dine, bekas staff Capitol Hill yang mengepalai AIPAC sejak 1981. AIPAC berhasil menyusun strategi yang menghasilkan penambahan bantuan kepada Israel yang mencapai lebih dari 2 miliar dolar setahun (1984). Dibawah kepemimpinan Dine, jumlah anggota AIPAC melonjak dari 11.000 menjadi lebih dari 50.000 dan anggaran tahunannya meningkat dari 750 ribu dolar menjadi 3 juta dolar.²¹ Pada 1992, anggaran tahunan dan jumlah anggota AIPAC semakin meningkat, masing-masing menjadi 15 juta dolar pertahun dan anggota lebih dari 55.000 orang.

Selain itu pada 1985, Dine berhasil memaksa Presiden Reagan untuk mengingkari perjanjian pembelian senjata yang telah disepakati dengan Raja Hussein dari Yordania dan berhasil mencegah kesepakatan pembelian jet tempur dengan Saudi Arabia.²² Kegagalan kesepakatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi AS jauh lebih besar daripada dalam hal prestise dan itikad baik (*goodwill*).

AIPAC telah menyapu ribuan peluang kerja dalam industri AS. Akibat dibatalkannya penjualan senjata tersebut, Arab Saudi kemudian membeli persenjataan seharga 4,5 miliar dolar dan Yordania menghabiskan 1,5 miliar dolar dari Inggris. Majalah Economist memperkirakan kerugian yang ditimbulkan Lobi terhadap ekonomi AS pada tahun 1990-an mencapai 20 miliar dolar.²³

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pelobi Israel dalam mengontrol pemerintahan AS antara lain; *pertama*, Pemerintah AS tidak pernah peduli dengan tindakan yang dilakukan Israel; *kedua*, Kongres

²¹ Paul Findley, *Mereka...*, Op. Cit., hlm: 61

²² Paul Findley, *Diplomasi...*, Op. Cit., hlm: 148

²³ Ibid, hlm: 21

yang menjadi sasaran lobi Yahudi dijadikan sebagai agen kebijaksanaan yang menempatkan kesejahteraan Israel disamping kepentingan AS; *ketiga*, lobi itu berhasil mendapatkan miliaran dolar dari pajak warga AS untuk diberikan kepada Israel.²⁴

Lobi tersebut juga telah menyumbat kebebasan bicara dengan memanfaatkan institusi-institusi bebas AS. Dalam banyak kasus, lobi berlindung dengan licin dibalik bunyi undang-undang, tetapi ia menyalahgunakan semangat, toleransi, kejujuran yang amat penting bagi perdebatan publik, dengan efektif menyingkirkan orang-orang yang menentang garisnya.

Akibatnya orang-orang yang berada pada kedudukan yang amat penting bagi penentuan kebijakan di Timur Tengah menjadi enggan untuk membicarakan kelanjutan proses perdamaian di kawasan tersebut. Apalagi jika pembicaraannya tidak mendukung Israel, mereka akan merasa takut kehilangan kedudukannya pada posisi yang dimilikinya tersebut, sehingga mereka memilih untuk tutup mulut.

Dari semua keberhasilan AIPAC dalam mempengaruhi bidang strategis dalam pemerintahan AS adalah adanya kesatuan pikiran mengenai isu tunggal yaitu Israel. Setiap kandidat anggota Kongres harus menjadi pendukung kuat Israel untuk dapat dipilih menjadi anggota Kongres. Terlepas dari semua itu, keberhasilan itu terutama dari penganggaran dana yang besar untuk kampanye para politisi yang menyuarakan dukungan pada Israel. Meskipun secara hukum AIPAC tidak boleh memberikan uang kepada para kandidat, banyak komite aksi politik pro Israelyang bertindak berdasarkan rating kandidat AIPAC dan menyalurkan dana mereka sesuai dengan itu.

²⁴ David W. Lesch (ed), The Middle East and The United States Historical and Political Reassessment, Westview Press Inc., 1996, hlm 430

Lobi Zionis AIPAC juga telah berhasil "membajak" kabinet pada periode pemerintahan kedua Bill Clinton. Semua posisi kunci dalam pembuatan kebijaksanaan pertahanan dan Timur Tengah berada dalam tangan tokoh Zionis atau pro Zionis. Sulit membayangkan Menteri Luar Negeri Madelaine Albright, Menteri Pertahanan William Cohen, Samuel "Sandy" Berger atau penasehat politik Ramh Israel Emmanuel akan bisa memahami penderitaan bangsa Palestina. Tokoh-tokoh ini jalas akan membuat kebijaksanaan dan langkah politik yang sangat menguntungkan Israel dan merugikan bangsa Arab pada umumnya dan khususnya Palestina.

Lobi Zionis AIPAC juga telah berhasil "membajak" kabinet pada periode pemerintahan kedua Bill Clinton. Semua posisi kunci dalam pembuatan kebijaksanaan pertahanan dan Timur Tengah berada dalam tangan tokoh Zionis atau pro Zionis. Sulit membayangkan Menteri Luar Negeri Madelaine Albright, Menteri Pertahanan William Cohen, Samuel "Sandy" Berger atau penasehat politik Ramh Israel Emmanuel akan bisa memahami penderitaan bangsa Palestina. Tokoh-tokoh ini jalas akan membuat kebijaksanaan dan langkah politik yang sangat menguntungkan Israel dan merugikan bangsa Arab pada umumnya dan khususnya Palestina.

BAB III

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

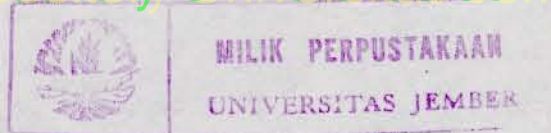
3.1. Latar Belakang Konflik Israel-Palestina

Pada awal abad ke-20, daerah Palestina adalah termasuk wilayah Dinasti Usmaniyah (*ottoman*), Turki. Daerah ini disebut *Filastin* atau *Al-Ard al-Muqaddasa* (tanah yang suci), yang sangat diagungkan oleh pengabut Islam, Kristen, dan Yahudi.

Pada masa Usmaniyah, Palestina dibagi menjadi tiga sanjak (propinsi), yaitu Yerusalem, Nablus, dan Acre. Penguasa Usmaniyah menggunakan system Millet yang memberikan otonomi luas kepada penduduk penganut Kristen dan Yahudi. Mereka dijamin kehidupan sosial, keagamaan, budaya, dan masalah lainnya. Maka pada waktu itu terlihat masyarakat yang damai, toleransi kehidupan umat beragama sangat tinggi, dan timbul kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama. Kekuasaan Turki di Palestina berakhir pada Perang Dunia I, saat Turki kalah perang dan Palestina jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1918. September 1923, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi menyerahkan mandat kepada Inggris untuk mengurus wilayah Palestina.¹

Untuk menjelaskan siapa yang paling berhak memiliki wilayah Palestina, perlu diketahui siapa sebenarnya yang disebut sebagai penduduk asli Palestina. Orang Palestina sekarang adalah keturunan orang-orang Philistine dan Kan'an. Mereka ini telah mendiami daerah Palestina selama 40 abad secara terus menerus. Keturunan ini telah bercampur darah dengan keturunan orang-orang Yunani, Romawi, Arab,

¹¹ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm: 43



Mongolia dan Turki. Mereka sebagian beragama Kristen dan sebagian yang lain beragama Islam.

Orang Yahudi tidak termasuk ke dalam golongan Palestina asli, karena mereka hanya merupakan masyarakat yang berjumlah sedikit. Sejak abad pertama sampai abad ke-20 mereka dapat dikatakan mereka berhenti berkembang. Banyak imigran Yahudi datang ke Palestina sebagai realisasi pelaksanaan "amanat" yang disampaikan Theodor Herzl dalam tulisannya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak tahun 1896.

Gelombang imigrasi massal yang disebut *aliyah* ini berdatangan dari berbagai negara: Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman Aden, Jerman dan negara-negara Afrika. Dan aliyah ini semakin mendapat angin setelah Menteri Luar negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothchild, salah seorang tokoh zionis yang berisi dukungan Pemerintah Inggris kepada keinginan gerakan zionis untuk mendirikan negara di Palestina. Surat yang dikirim pada tanggal 2 November 1917 itu terkenal dengan Deklarasi Balfour.

Dikeluarkannya Deklarasi Balfour tersebut akibat rasa simpati dan dukungan dari Inggris kepada orang-orang Yahudi yang telah mengalami pengejaran dalam perantauannya selama masa Diaspora di Eropa pada sekitar abad ke 18 dan 19. Pada masa itu kehidupan orang-orang Yahudi sangat memilukan apalagi oleh ancaman anti semitisme orang-orang Eropa. Oleh karena itu, sebagai rasa simpatinya, Inggris memberikan dukungannya untuk membentuk national home bagi kaum Yahudi di Palestina dengan dikelurkannya Deklarasi Balfour.

Banyaknya orang Yahudi yang bermigrasi ke Palestina, mengakibatkan masyarakat Arab Palestina terdesak. Mereka terdesak dan akhirnya timbullah bentrokan Yahudi dan Palestina. Bentrokan ini berlarut-larut dan Inggris sebagai pemegang mandat Palestina tidak dapat

menyelesaikannya. Selanjutnya masalah Palestina ditangani oleh PBB. Setelah mengalami proses yang panjang, akhirnya Majelis Umum PBB menyetujui rencana pembagian Palestina menjadi tiga bagian, yang tercantum dalam resolusi No. 181 (II) 29 November 1947, yaitu :

1. Negara Arab, dengan wilayah Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur Gaza dan kota pelabuhan Jaffa.
2. Negara Yahudi, dengan wilayah safad, Tiberias, Beisan, Haifa, Tulkarm, Ramleh, Sahara Nageb, dan Jaffa.
3. Yerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional.

Bangsa Arab-Palestina dan negara-negara Arab menolak pembagian wilayah itu melanggar ketentuan dalam Piagam PBB yang memberi hak kepada bangsa-bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri. Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Negara-negara Arab yang bertetangga dengannya mengirimkan pasukan ke wilayah Palestina dan pecahlah perang Arab-Israel yang pertama. Negara Arab Palestina tidak pernah terwujud, dan ketika gencatan senjata dicapai pada bulan Mei 1948, pasukan Israel menguasai sebagian besar wilayah yang merupakan hak Palestina.

Menjelang akhir tahun tahun 1949, lebih dari 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi.² Mereka mengungsi ke berbagai negara, tidak hanya ke negara tetangga Palestina saja tetapi juga ada yang sampai di Amerika dan Jerman. Jumlah pengungsi itu bertambah dalam perang tahun 1967 ketika 323.000 orang Palestina terusir dari rumah mereka. Selain itu Israel juga mengusir beribu-ribu orang lainnya dari rumah-rumah mereka.

² M. Amien Rais (ed), *Prospek Perdamaian di Timur Tengah (sebuah Tilikan Latar Belakang)*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 1995, hlm :1

3.2. Masalah Perbatasan dan Perebutan Wilayah

Konflik Palestina-Israel telah menjadi konflik regional. Perang Arab-Israel telah beberapa kali terjadi. Pada perang tahun 1967, seluruh wilayah yang diperuntukkan Negara Arab Palestina, dicaplok oleh Israel. Untuk mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan konflik yang terjadi, maka pengembalian wilayah Palestina yang dikuasai Israel adalah hal yang perlu diusahakan.

Akan tetapi permasalahan utama adalah kekakuan Israel untuk mempertahankan wilayah itu. Mereka selalu berdalih, bahwa daerah Tepi Barat adalah wilayah Judea dan Samari "yang dijanjikan" oleh kitab suci sebagai daerah orang Israel. Untuk merealisasikannya, mereka membangun pemukiman Yahudi.

Sebelum membicarakan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, akan ditulis terlebih dahulu klasifikasi tanah berdasarkan kepemilikan. *Pertama*, tanah pribadi milik orang Arab. *Kedua*, tanah pribadi milik orang Yahudi. Sebelum tahun 1948, ada tanah sekitar 8.000 acre di blok Hebron dan Etzion dimiliki oleh Yahudi. Setelah tahun 1967, tanah pribadi ini bertambah, diperkirakan sekarang berjumlah 17.500 acre. *Ketiga*, tanah negara yang langsung berada dibawah kontrol negara. Diatas tanah negara inilah, pemerintah Israel membangun pemukiman Yahudi. Tetapi ada juga orang Yahudi yang menyerobot tanah milik orang Arab dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut. Sejak 1967 Israel menduduki Jerusalem Timur Arab, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Jalur Gaza melalui tindak kekerasan dan pada saat yang sama terus mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di semua wilayah tersebut.³

Orang-orang Yahudi tidak mempunyai hak untuk mendirikan pemukiman-pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan, sebagaimana

³ M. Riza Sihbudi, op. cit., hlm : 50

yang berulang kali diperingatkan oleh Amerika Serikat dan PBB. Namun Israel tetap menentang opini dunia dengan menjajah wilayah-wilayah pendudukan hampir sejak berakhirnya perang 1967. Kurang dari tiga minggu kemudian, pada 27 Juni, Israel telah secara efektif mencaplok Jerusalem Timur dan pada 15 Juli mendirikan pemukiman Israel yang pertama di wilayah-wilayah itu.⁴

Saat pemerintahan Shamir, Israel dinyatakan telah merampok paling tidak 70% dari seluruh Tepi Barat dan 50% tanah di Jalur Gaza dan Departemen Perumahan Israel merencanakan untuk membuat perumahan bagi sekitar 4 juta orang Israel, padahal jumlah orang Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza saat itu tidak lebih dari 1,7 juta.⁵

Pada 1991, terdapat sekitar 250-280 ribu pemukim Yahudi di Gaza dan Tepi Barat termasuk Jerusalem Timur. Paling tidak, ada 25 ribu rumah dengan bangunan permanen. Daerah pemukiman Yahudi itu tersebar memenuhi hampir semua wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, daerah-daerah sekitar Hebron, Jerusalem, Jericho, Ramallah, Nablus dan Jenin sudah "habis" digunakan untuk perluasan pemukiman Yahudi.

Kemudian pada Mei 1992 Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Israel telah menyita atau menjauhkan 55 persen tanah di Tepi Barat, 42 persen di Jalur Gaza dan seluruh Dataran Tinggi Golan dari pemilikan bangsa Palestina. Seluruh sumber air berada di bawah kontrol Israel dan 30 persen air di Tepi Barat dialihkan ke Israel atau para pemukimnya.

Sejak pemerintahan baru PM Yitzhak Rabin pada Juni 1993, kebijaksanaan tentang pemukiman di wilayah pendudukan merubah kebijakan dari pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa

⁴ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Mizan, Bandung, 1993, hlm : 265

⁵ M. Amien Rais, *Prospek Perdamaian Timur Tengah* dalam Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah, UGM, Yogyakarta, 1993, hlm: 7-8

pemukiman di seluruh tanah Israel merupakan hak dan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari keamanan nasional Israel.⁶

Dengan kebijakan pemerintahan Israel yang baru ini, tindakan yang dilakukan antara lain : tidak melanjutkan pembangunan pemukiman baru; membatalkan pembangunan sekitar 5.000 unit rumah tambahan; menghentikan deklarasi "tanah negara"; dan menanggukkan pembangunan jalan untuk penghuni dalam wilayah teritori.

Tetapi pembekuan aktifitas pembangunan pemukiman tersebut tidak berlangsung lama, setelah dikeluarkannya perubahan kebijakan tersebut, pemerintah Israel melakukan hal-hal sebagai berikut: mengumumkan bahwa pembangunan sekitar 11.000 unit rumah sedang berlanjut; dialokasikannya dana sejumlah 36 juta dollar pada 1993 untuk Departemen Pemukiman dari Organisasi Yahudi Dunia; membuat komitmen untuk tidak menghentikan atau mengurangi pembangunan di Jerussalem Timur.

Tindakan Yahudi yang mendirikan pemukiman-pemukiman di atas tanah milik bangsa Palestina di wilayah-wilayah pendudukan menjadi rintangan serius bagi usaha mencapai perdamaian. Pada dasarnya, negeri Zionis itu tidak pernah benar-benar memegang erat konsep *land for peace* seperti ketika mulai merundingkan perdamaian dengan Palestina dengan Palestina pada awal 1990-an lalu. Apalagi setelah AS, pada Maret 1997 lalu, memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengancam pembangunan pemukiman Yahudi di Har Homa yang telah menyebabkan gelombang kerusuhan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.⁷

Karena itulah AS juga patut dipersalahkan sebab telah berkolusi dengan Israel dalam pendudukan militer dan penjajahan atas tanah

⁶ Journal of Palestine Studies, hlm : 151

⁷ Jawa Pos, 6 April 1997

Palestina. Meskipun kebijakan AS secara resmi menentang pemukiman-pemukiman Yahudi, tidak ada upaya yang pernah dilakukan untuk menahan bantuan ekonomi dan militer AS sebesar 3 milyar dollar AS kepada Israel untuk membuat negara Yahudi itu menghentikan penjajahannya atas wilayah-wilayah pendudukan. Tanpa bantuan AS, tentunya Israel tidak akan mempunyai sumber-sumber untuk mendirikan dan mempertahankan pemukiman-pemukiman itu atau meneruskan pendudukan militernya.⁸

3.3. Perkembangan Konflik Israel-Palestina

Setelah dikeluarkannya Resolusi PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947, yang menetapkan pencabutan mandat pemerintah Inggris atas Palestina itu, misi pemelihara perdamaian PBB dibentuk untuk pertama kalinya, yakni Organisasi PBB Untuk Urusan Pengawasan terhadap Negara yang Kalah Perang (*The United Nations Truce Supervision Organization*) yang bertugas menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.⁹

Resolusi Nomer 242, dikeluarkan setelah gencatan senjata dicapai pada perang Arab-Israel pada tahun 1967. Resolusi itu menekankan prinsip ketidaksahan pengambilalihan wilayah dengan kekerasan dan perlu diciptakan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Untuk itulah Resolusi ini menuntut Israel untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya dalam perang tahun 1967.

Namun Israel tidak pernah bersedia mematuhi Resolusi yang dikeluarkan DK PBB sehingga dunia memberi kecaman kepada Israel atas tindakannya tersebut. Alasan Israel menentang PBB dalah karena bangsa-

⁸ Paul Findley, Op. Cit., hlm: 260

⁹ M. Amien Rais, Op. Cit., hlm : 2

bangsa didunia telah berulang kali menunjukkan perlawanan mereka terhadap pendudukan Israel.

Mantan Menteri Luar Negeri James Baker suka mengatakan bahwa perdamaian dapat muncul di Timur Tengah hanya jika semua pihak dalam konflik itu menghendaknya. Namun catatan Israel dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah secara konsisten lebih memilih tanah daripada perdamaian. Meskipun Israel telah ditawari sejumlah rencana perdamaian dengan kepercayaan yang baik selama bertahun-tahun, ia selalu menolak semuanya dan lebih suka mempertahankan wilayah yang direbutnya melalui kekerasan.

3.3.1 Peran AS dalam Perundingan Damai Israel-Palestina.

Setiap Presiden AS mempunyai usaha dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Mereka telah diyakinkan oleh para pemimpin Israel bahwa Israel menginginkan perdamaian. Namun ketika AS berusaha menemukan rumusan perdamaian, para presiden itu menyadari selama beberapa dasawarsa bahwa Israel mempunyai prioritas-prioritas lain.¹⁰

Presiden Harry Truman adalah presiden pertama yang mengetahui sikap Israel yang sebenarnya terhadap perdamaian di Lausanne, Swiss pada 1949, Truman merasa prihatin terhadap sikap Israel yang membuat "klaim-klaim luas" atas wilayah Palestina.

Presiden Dwight Eisenhower menghadapi kekerasan pendirian yang sama dari Israel. Presiden yang telah mengirim utusan rahasia ke Timur Tengah pada awal 1956 untuk mendorong tercapainya perdamaian antara Israel dan Mesir mendapati para pejabat Israel sama sekali tidak

¹⁰ Paul Findley, Op. Cit., hlm : 286

mau menyerah dalam sikap mereka untuk tidak membuat konsensi-konsensi apapun demi mencapai perdamaian.

Presiden John Kennedy tidak membuat usaha yang berarti dalam mencapai perundingan, ia hanya membentuk Korps Perdamaian sebagai salah satu kebijakannya dan berusaha memperbaiki hubungan AS dengan negara-negara Arab dan memberi sinyal-sinyal untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara Arab progresif.

Lyndon Johnson tidak melakukan usaha-usaha serius untuk mencapai perdamaian, terutama dikarenakan simpati kuat pro Israel Johnson, sehingga mereka tidak menemui konflik serius dengan Israel.

Presiden Richard Nixon menyatakan rintangan yang menghalangi tercapainya pemecahan masalah di kawasan itu adalah kekerasan pendirian Israel, penolakan negara-negara Arab untuk tawar-menawar secara realistis dan keasyikan pemerintah AS dengan inisiatif-inisiatif lain.

Presiden Gerald Ford merasa terganggu dengan sikap Israel yang menolak membuat konsensi untuk mencapai persetujuan dengan Sinai. Meskipun AS telah membantu Israel untuk menjadi lebih kuat secara militer dibanding dengan negara-negara Arab dengan harapan bahwa ia akan menjadi lebih lunak, pendiriannya malah semakin keras dan perdamaian tidak menjadi lebih dekat dibanding sebelumnya.

Upaya Presiden Jimmy Carter untuk mencapai perjanjian perdamaian Mesir-Israel pada 1979 menyebabkan dirinya terlibat konflik yang tak habis-habisnya dengan Israel.

Ronald Reagan mengajukan rencana yang komprehensif bagi Timur Tengah yang disebut Reagen Plan (Rencana Reagen), tetapi gagasan Reagen tersebut tidak menyebutkan prinsip "penentuan nasib sendiri" bagi rakyat Palestina.

Sedangkan usaha yang dilakukan George Bush hanya meneruskan "tradisi" para pendahulunya yang menjalankan politik luar negeri yang kontradiktif di kawasan Timur Tengah, dimana di satu sisi berusaha mengupayakan perdamaian yang mulai kondusif dengan naiknya Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri Israel (Juni 1992) tetapi disisi lain justru ingin mengobarkan perang terutama dengan Irak.

Sementara itu sikap Bill Clinton sebagai Presiden yang saat ini sedang berkuasa, tetap tidak mengubah kebijakannya terhadap kawasan Timur Tengah. Sebagai Presiden dari Partai Demokrat, Clinton memang tidak pernah menyembunyikan sikapnya yang sangat pro-Israel. Karena itu, sampai saat ini semua perundingan damai yang diadakan tidak pernah ada hasilnya. Hal ini disebabkan AS tidak pernah bertindak tegas dengan semua pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap hasil kesepakatan yang diadakan.

3.3.2. Proses Perundingan Damai Arab-Israel

Israel telah menolak setiap rencana perdamaian yang dikemukakan oleh negara-negara Arab dan AS kecuali untuk perjanjian bilateral dengan Mesir. Berikut ini usulan-usulan utama untuk perdamaian dan reaksi Israel :¹¹

1. *Misi Jarring PBB 1967-1971.*

Diplomat Swedia Gunnar Jarring dipilih sebagai perantara khusus PBB di Timur Tengah dibawah ketentuan-ketentuan DK PBB No. 242, yang menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Jarring tidak menemui keberhasilan dalam misi ini, dan Israel tetap tidak mau mundur dari batas-batas pra-5 Juni 1967.

¹¹ Ibid, hlm : 291

Dengan itu Misi Jarring berakhir dan AS tidak melakukan usaha lebih jauh untuk melaksanakan Resolusi 242.

2. *Rencana Roger 1969.*

Menteri Luar Negeri William P. Rogers pada 9 Desember menguraikan rencana sebagai pelaksanaan Resolusi 242 yang mencakup penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang diduduki pada 1967 dan penerimaan Arab akan perdamaian permanen dengan Israel serta penyelesaian yang adil bagi masalah pengungsi Palestina. Tetapi pada 11 Desember kabinet Israel mengeluarkan pernyataan menolak mentah-mentah usulan itu.

3. *Rencana Perdamaian Komprehensif Carter 1977*

Pada 27 Juni, Presiden Jimmy Carter mengeluarkan naskah yang berdasarkan Resolusi 242 yang intinya menuntut Israel menarik pasukannya dari tiga garis depan (Sinai, Golan dan Tepi Barat). Tetapi Perdana Menteri Menachem Begin tidak bersedia menerima gagasan tersebut dan akhirnya perdamaian mengalami jalan buntu.

Setahun kemudian, Carter, Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat bertemu di Camp David untuk merumuskan perdamaian. Tetapi pertemuan itu hanya menghasilkan pengembalian wilayah Mesir saja dan Israel tetap menduduki wilayah Palestina.

4. *Rencana Perdamaian Fahd 1981*

Putra Mahkota Saudi Arabia Fahd bin Abdul Azis mengemukakan pada 8 Agustus merencanakan perdamaian yang menegaskan hak negara-negara di wilayah itu untuk hidup damai.

Termasuk juga penarikan mundur Israel dan pendirian negara Palestina. Israel menolak usulan itu dan mengumumkan akan menentang rencana itu dan akan mendirikan lebih banyak pemukiman di Tepi Barat.

5. *Rencana Perdamaian Reagen 1982*

Berdasarkan Resolusi 242, pemerintahan Reagen mengusulkan penghentian kegiatan di pemukiman Israel, otonomi penuh bagi Israel dan Jerusalem tetap terbagi dan masa depannya dirundingkan dengan pihak-pihak terkait. Sekali lagi Israel menolak bahkan tetap meneruskan pembangunan pemukiman baru di wilayah pendudukan.

6. *Rencana Perdamaian Fez Arab 1982*

Menanggapi usulan Pangeran Fahd, pada 9 September para pemimpin negara-negara Arab mengadakan pertemuan di Fez, Maroko. Rencana perdamaian itu menawarkan pengakuan implisit terhadap Israel dengan menyerukan pada DK PBB agar memberikan jaminan bagi perdamaian untuk semua negara di wilayah itu. Pemerintah Israel menolak usulan itu, bahkan menganggapnya sebagai penentangan terhadap perdamaian.

7. *Rencana Perdamaian PLO 1988*

Pada 5 November, PLO menerima Resolusi DK PBB No 242 dan 338 dan menyerukan diadakannya konferensi perdamaian internasional. Israel segera menolak usulan PLO dan menyatakan bahwa keabsahan dari deklarasi itu tidak akan menunjang perdamaian di Timur Tengah. Namun atas dasar pernyataan itu,

AS menyetujui menyelenggarakan pembicaraan bilateral dengan PLO untuk pertama kalinya. Pembicaraan itu tidak mengalami kemajuan sehingga pada akhirnya dihentikan pada Mei 1990 oleh AS atas desakan Israel.

8. *Rencana Perdamaian Bush 1989*

Pada 22 Mei, Pemerintah Bush mendesak semua pihak untuk bersedia memulai proses perdamaian. Karena kebandelan Israel, pemerintah Bush merasa frustrasi dengan dipercepatnya aktivitas pemukiman Israel.

Mulai 30 Oktober 1991, para pejabat Arab dan Israel bertemu di Madrid. Kelanjutan pembicaraan damai itu berjalan sangat lambat dan Israel menolak untuk mengadakan pertemuan lebih dari beberapa hari setiap bulannya.

Yitzhak Rabin, Perdana Menteri baru yang menggantikan Yitzhak Shamir pada 1992, memperpanjang pembicaraan namun tidak merubah kebijakan Shamir secara mendasar. Ia juga menentang berdirinya negara Palestina merdeka dan juga menolak pemisahan Jerusalem dari wilayah Israel. Rabin hanya setuju mengembalikan sebagian wilayah Tepi Barat. Dengan kata lain, jika Shamir menafsirkan formula "*land for peace*" sebagai "*land for me, peace for you*" maka Rabin menafsirkannya sebagai "*a piece of land for peace*". Pada akhirnya setelah pembicaraan pada September, Oktober dan November 1992 tidak ada kemajuan yang dilaporkan dalam semua perundingan bilateral itu.

Pihak-pihak Arab menangguhkan baik pembicaraan multilateral maupun pembicaraan bilateral pada Desember 1992, ketika Israel

mengusir 413 orang Palestina dari wilayah-wilayah pendudukan di Lebanon Selatan.

Pada 20 Agustus 1993, secara diam-diam pemimpin Palestina Yasser Arafat dan PM Yitzhak Rabin mengadakan pertemuan penting di Oslo ibukota Norwegia untuk menyepakati tahapan proses perdamaian. Hasil perundingan itu dijadikan rujukan pada setiap perundingan perdamaian Palestina-Israel berikutnya.¹²

Kemudian pada 13 September 1993 di Washington diadakan penandatanganan deklarasi pemerintahan sementara Palestina (PLO) di Jalur Gaza dan Jericho yang disebut dengan *The Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement* atau Deklarasi Prinsip. Kemudian Perjanjian Oslo I ditandatangani pada 4 Mei 1994 oleh Israel dan PLO di Kairo yang berisi kesepakatan damai di Jalur Gaza dan Jericho.¹³

Semula kesepakatan tersebut dinilai sebagian pengamat sebagai "terobosan bersejarah" bagi Timur Tengah yang akan mengakhiri hampir 50 tahun konflik Israel-Palestina. Tetapi setelah penandatanganan Deklarasi Prinsip itu Israel mencaplok 5% dari total tanah wilayah Tepi Barat dan tetap menghancurkan oposisi politik Palestina terhadap kesepakatan Oslo.¹⁴

Kesepakatan Oslo II ditandatangani pada 28 September 1995. Namun sebagian kalangan menilai bahwa perjanjian Oslo I dan II bukanlah merupakan terobosan yang besar apalagi bersejarah, karena sebelumnya sudah sejak Camp David, masalah otonomi itu dijanjikan oleh pihak Israel. Masalahnya adalah benarkah otonomi di Gaza dan Jericho itu bisa menjadi embrio bagi sebuah negara Palestina merdeka, sebagai salah

¹² Panji Masyarakat, 15 september 1999

¹³ M. Riza Sihbudi, *Perkembangan Timur Tengah dan Masalah Hubungan Indonesia-Israel dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hlm : 123

¹⁴ Ummat, 29 September 1997

satu masalah yang paling substansial di Timur Tengah. Hal inilah yang selalu dipersoalkan oleh mereka yang tidak terlibat dalam perundingan Timur Tengah gagasan AS.¹⁵

Apalagi setelah berkuasanya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Partai Likud, perdamaian Israel-Palestina semakin sulit diwujudkan. Benjamin Netanyahu sangat menentang proses perdamaian dengan Palestina, ia tidak akan menghormati persetujuan pemerintah Israel sebelumnya atas kesepakatan mengenai penarikan mundur pasukan Israel dari Hebron yang disetujui pada 1995. Seperti yang telah disepakati pada perjanjian Oslo II, penarikan pasukan Israel dari Hebron yang seharusnya dilakukan pada September 1996 ditunda oleh PM Benyamin Netanyahu sampai Mei 1999. perjanjian Oslo II terus mengalami penundaan, penarikan mundur tentara Israel dilakukan secara bertahap -selama 6 bulan, setahun dan 18 bulan kemudian belum terealisasi sepenuhnya.¹⁶

Dan pemerintah Israel semakin memperluas pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan dengan menambah 6500 unit pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur.¹⁷ Selain itu Netanyahu akan mendatangkan 100.000 imigran Yahudi dan membangun pemukimannya di wilayah pendudukan. Hal ini menunjukkan bahwa Israel selalu mengingkari perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Sehingga perdamaian yang abadi sangat sulit diwujudkan di kawasan ini, akibat sifat Israel yang tidak pernah konsisten terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat.

¹⁵ M. Riza Sihbudi, Indonesia Timur Tengah. Masalah dan Prospek, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm: 108

¹⁶ Gatra, 18 Januari 1997

15 Januari 1997, Parlemen Israel (Knesset) meratifikasi penyerahan Hebron kepada Palestina. Perjanjian Hebron itu setidaknya berisikan 10 butir kesepakatan. Antara lain, penarikan mundur 80% pasukan Israel dari Hebron, mulai 5 hari sejak penandatanganan dan berakhir awal Maret 1997. Dilanjutkan sampai pertengahan Mei 1998, tetapi Palestina dituntut untuk mengubah Piagam Palestina yang berisi pernyataan penghancuran negara Israel yang sudah dilakukan Palestina pada April 1996.

Setelah mengadakan pertemuan maraton selama sembilan hari, pada 23 Oktober 1998, Presiden Bill Clinton, Arafat dan Netanyahu bertemu untuk menandatangani Perjanjian Wye River I, yang berisi tentang penarikan Israel dari 13% wilayah Tepi Barat yang dibagi dalam tiga tahap, jaminan Palestina untuk memberantas aksi kelompok militan anti Israel, perbaikan program organisasi Pembebasan Palestina yang menghendaki penghancuran Israel dan perundingan final perdamaian. Tetapi Netanyahu membekukan kesepakatan setelah dua bulan berjalan dengan alasan pihak Palestina gagal mengatur masalah keamanan.¹⁷

Pada 5 September 1999, telah ditandatangani kesepakatan Wye River II oleh Yasser Arafat, Ehud Barak, Husni Mubarak, Raja Abdullah II dan Madeleine Albright. Kesepakatan ini pada intinya menyepakati bahwa 15 September 2000 adalah batas akhir bagi kerangka kerja perdamaian menyeluruh.¹⁸

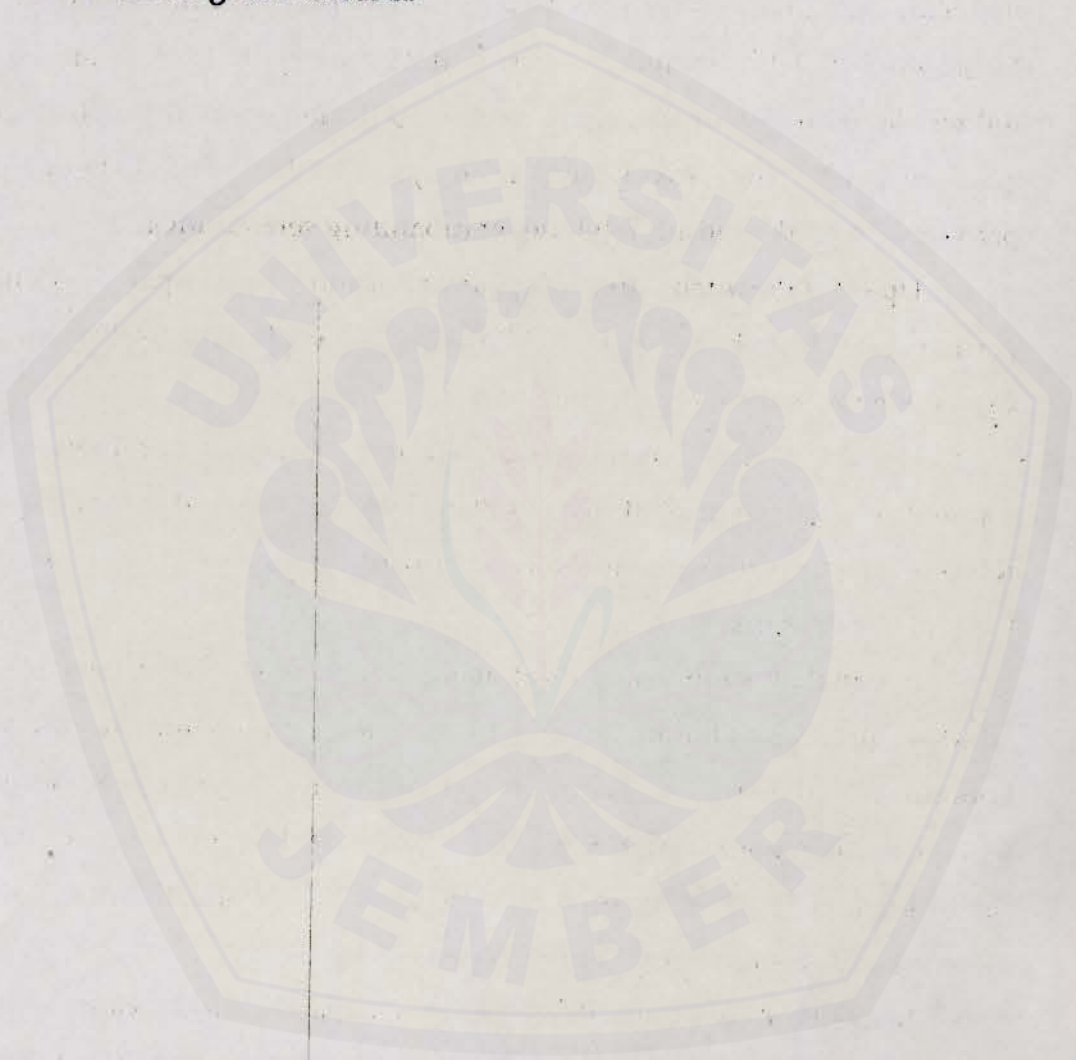
Sebuah tahap perundingan Israel dengan Otoritas Palestina juga telah ditandatangani pada 2 November 1999 oleh Presiden Clinton, Ehud Barak dan Yasser Arafat di Oslo yang menyepakati 13 Februari 2000 adalah *deadline* kesepakatan permanen untuk status wilayah Palestina.¹⁹

¹⁷ Forum Keadilan, 19 September 1999

¹⁸ Pikiran Rakyat, 24 Maret 1997

¹⁹ Tempo, 27 Februari 2000

Namun semua kesepakatan tersebut sering diragukan keberhasilannya. Sejarah telah mengajarkan kepada bangsa Arab untuk skeptis terhadap janji-janji yang ditawarkan Israel. Berbagai pihak saling tidak percaya dan sulit membayangkan bahwa konflik Israel-Palestina bisa tuntas hingga terbentuk negara Palestina.



BAB IV

PENGARUH LOBI YAHUDI TERHADAP KEBIJAKAN CLINTON
DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

4.1. Kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina.

Kebijakan politik luar negeri AS mempunyai jangkauan global berprinsip pada 3 pola sentral, yakni pengalaman sejarah, penegakan ide-ide demokrasi dan kepentingan global. Ketiga pola sentral ini digunakan untuk memahami strategi global AS, yaitu usaha-usaha untuk mempertahankan hegemoninya, mampu untuk memperbesar dan memperluas hubungan kerjasama dengan negara-negara lain (dalam hal ini dengan sekutunya).

Sebagai negara superpower dan telah memenangkan Perang Teluk II, Amerika Serikat yang merasa sebagai negara yang paling bertanggungjawab dalam menangani Krisis Teluk dan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menata peta politik di Timur Tengah. Salah satunya adalah berusaha mengupayakan perdamaian Timur Tengah dengan menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam upaya merealisasikan perdamaian tersebut, AS melakukan lawatan diplomatik, namun lawatan diplomatik ini tidak berjalan mulus, meskipun telah ditawarkan adanya beberapa konsesi dan jaminan ekonomi untuk memperkuat usul AS terhadap perundingan damai dimana tujuan lawatan tersebut untuk mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

Amerika sebagai negara pemrakarsa perundingan itu berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang menghambat proses perundingan perdamaian. Sebagai upaya mengatasi perbedaan itu, AS berusaha untuk melancarkan ofensif diplomatik terhadap negara-negara

yang terlibat dalam sengketa Israel-Palestina serta berpengaruh seperti Mesir dan Arab Saudi untuk membujuk pihak-pihak yang bersengketa agar bersedia menerima usulan perundingan damai AS.

Berkaitan dengan upaya dalam perundingan tersebut AS mencoba memainkan beberapa peranan yakni sebagai mediator dan sebagai fasilitator, sebagai mediator AS berusaha untuk mempertahankan titik persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan langsung dalam sengketa. Dan sebagai fasilitator, AS berusaha menciptakan keseimbangan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, AS berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan antara kedua pihak dalam suatu bentuk perundingan damai yang akan menciptakan stabilitas kawasan Timur Tengah.

4.1.1. Kebijakan AS Yang Hipokrisi

Dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, ternyata AS mengambil pilihan untuk menerapkan keputusan politik standar ganda. Dipilihnya politik standar ganda ini salah satu alasannya karena pembuatan keputusan yang berkompetensi dengan Timur Tengah dikuasai oleh lobi Yahudi.

Usaha-usaha lobi Yahudi dalam pemerintah AS ditujukan untuk menimbulkan sentimen pro Israel. Keberhasilan sentimen pro Israel ini telah memberi keuntungan besar bagi Israel karena telah memberikan doktrin "Israel First". Doktrin ini memandang Israel tidak hanya sebagai sebuah asset strategis, tetapi juga sebagai yang pantas didukung penuh "dasar-dasar moral" (*moral ground*) bentuk pemerintahannya yang "demokratis", warna-warna budaya baratnya dan di atas segala-galanya,

fungsi Israel sebagai tempat perlindungan dari "pengganti kerugian" bagi orang-orang Yahudi yang telah mengalami "penderitaan historis".¹

Pada mulanya kebijakan AS ditujukan untuk meminimalkan pengaruh Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Untuk itu AS menjadikan Israel dan Iran sebagai sekutu terpentingnya. Namun dalam perkembangannya, karena kehadiran Israel menimbulkan kontroversi, AS pun menjadi pihak yang terlibat dalam konflik berkepanjangan di kawasan ini. Posisi AS yang disatu sisi ingin menciptakan "perdamaian" tetapi disisi lain membutuhkan sekutu yang dapat menjamin kepentingannya, menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan AS di Timur Tengah.²

AS memang telah melibatkan diri langsung dalam masalah Timur Tengah, atas nama keamanan dan perdamaian. Peran AS dalam perundingan Timur Tengah yang kini tengah dilakukan adalah dalam rangka "permainan catur". Tujuannya jelas. AS ingin mendorong perdamaian di Timur Tengah, menurut cara mereka sendiri.

Permainan AS ini merupakan bagian usahanya untuk menghilangkan tuduhan dunia, bahwa AS menjalankan *double standart* dalam kebijakannya di Timur Tengah. AS ingin menekankan, walaupun selalu mendukung kepentingan Israel, tetapi AS tetap tidak membenarkan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. AS "mendukung" penyelesaian *Land for Peace*, sebagai yang tercantum dalam resolusi PBB No. 242.

Kebijakan AS baik domestik maupun internasional secara menyeluruh merupakan rangkaian dari strategi globalnya. Agaknya hal yang paling utama adalah masalah keamanan. Hal ini dapat dimaklumi

¹ M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm: 24

² Ibid, hlm: 18

jika dilihat dari sudut ekonomi, AS tergolong *self-sufficient* dan dari sudut kebudayaan, ideologi, AS memiliki peranan besar dalam mengembangkan demokrasi dan kebudayaan modern seiring dengan pola-pola yang telah diciptakan.³

4.1.2. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel-Palestina

Sejak semula proses perdamaian yang didorong AS sudah berjalan tidak adil. Tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh AS pada pihak Palestina, sedangkan jaminan untuk Israel cukup jelas, yakni AS tidak akan pernah menjatuhkan sanksi apapun untuk memaksa Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru di daerah pendudukan.

AS mengatakan pada tokoh Palestina bahwa Amerika hanya dapat melakukan tekanan politik pada Israel dan bukan sanksi. Dalam kenyataannya tekanan politik itupun tidak pernah ada, mengingat AS terus menyalurkan dana untuk pembangunan pemukiman baru di daerah pendudukan, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.

Sebaliknya, AS menekan dan menakut-nakuti Palestina agar mau bergabung dalam proses perundingan damai yang diprakarsai AS. James Baker pernah mengatakan bahwa rakyat Palestina akan menjadi pihak yang paling rugi bila tidak ada proses perdamaian. Tetapi masalahnya, tidak ada jaminan apapun bahwa Palestina akan mendapatkan apa yang sudah diidamkannya selama ini. Tidak ada jaminan apapun bahwa Palestina akan mendapatkan kembali wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti ditetapkan dalam resolusi DK PBB No. 242 dan 338.

Baker juga pernah mengatakan bahwa AS tidak ingin melihat sebuah negara Palestina merdeka, sehingga Amerika juga pasti akan

³ Andrik Parwasito DE.A, Strategi Global Superpower dalam Era Perang Dingin, Sebelas Maret Univ Press, Semarang, 1994, hlm: 24-28

memblokir setiap usaha ke arah hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.⁴

Dalam pada itu seluruh langkah AS dalam usulan "mencapai perdamaian" itu selalu berwajah ganda atau hipokrit. Seperti misalnya, AS mendorong perdamaian, tetapi pembangunan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan yang terang-terangan melanggar moralitas dan hukum internasional serta ketentuan-ketentuan konvensi Genewa, dibiarkan jalan terus. Alasannya sangat ganjil pembangunan pemukiman adalah urusan kemanusiaan yang tidak usah dihubungkan dengan urusan politik.

Permintaan bantuan Israel sebesar 10 miliar dollar AS untuk membangun pemukiman baru dalam rangka menampung arus imigrasi Yahudi terutama dari Rusia telah diberikan AS. Sedangkan pada saat itu pemerintah Federal AS sendiri membutuhkan dana 13,2 miliar dollar AS untuk mengatasi krisis perumahan di Amerika. Jumlah penduduk Israel lebih dari seperlima puluh penduduk Amerika, tetapi permintaan bantuan sebesar 10 miliar dollar oleh Israel itu tetap dicairkan juga.⁵

Tampak jelas bahwa AS lebih menonjolkan hak Israel, dan mengabaikan hak Palestina. Menurut pemerintah AS, Palestina memang harus diberi hak, tapi bukan hak untuk mendirikan sebuah negara merdeka dan mereka tidak berhak menentukan masa depan Israel. Karena itu Amerika sangat menentang pendirian sebuah negara Palestina merdeka. Memang aneh, pernyataan seperti ini keluar dari sebuah negara yang sangat memuji dan mengagungkan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak manusia.

⁴ M. Amien Rais, Prospek Perdamaian Timur Tengah dalam Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah, UGM, Yogyakarta, 1993, hlm: 10

⁵ Ibid, hlm: 7-8

4.1.2.1. Kebijakan Partai Republik dan Partai Demokrat

Pada dasarnya kedua partai terbesar di AS tersebut mempunyai kebijakan yang secara garis besar sama terhadap Timur Tengah khususnya Israel. Masing-masing merasa bahwa AS mempunyai ikatan yang khusus dengan Israel sebagai sekutu strategis bagi kepentingan AS di Timur Tengah.

Partai Republik menyatakan bahwa AS akan terus menjalin hubungan yang bersifat strategis dengan Israel, yang dianggap sebagai satu-satunya negara demokrasi di kawasan. Untuk mewujudkan hubungan tersebut AS akan melanjutkan pemberian bantuan kepada Israel yang berupa kerjasama ekonomi, politik dan militer untuk menjaga keamanan Israel dari ancaman negara-negara Arab.

Oleh sebab itu, mereka sangat setuju dengan upaya George Bush yang berhasil mengadakan pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Bagaimanapun suatu kesepakatan damai yang berhasil dicapai dianggap akan dapat melindungi keamanan Israel dari ancaman negara-negara Arab tetangganya.

Demikian juga dengan Partai Demokrat, dukungan AS terhadap kesepakatan damai yang telah diadakan adalah sangat penting bagi kepentingan AS di kawasan. Keamanan Israel adalah hal yang utama bagi hubungan AS-Israel agar mereka dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.⁶

Secara tertulis memang platform kebijakan kedua partai tersebut adalah sama. Tetapi pada kenyataannya Partai Demokrat yang konservatif lebih berpihak kepada Israel dibanding Partai Republik. Sehingga Lobi Yahudi lebih mendukung Partai Demokrat. Karena dalam praktiknya

⁶ Journal Of Palestine Studies, Vol:XXII/No.1, Autumn 1992

Presiden yang berasal dari Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan Israel daripada negara-negara Arab.

Seperti saat pemilihan presiden tahun 1960, kedua kandidat memberikan janji-janji yang mendukung berdirinya negara Israel. Tetapi para pemilih Yahudi lebih mendukung Kennedy sehingga ia bisa menjabat Presiden. Dan janji Kennedy tersebut bukan omong kosong, setelah menduduki kursi kepresidenan, ia meningkatkan kerjasama militer dengan Israel.⁷

Sedangkan saat berkuasanya Presiden Eisenhower dari Partai Republik, Israel dipaksa untuk menarik mundur pasukannya dari Sinai saat terjadi krisis Suez pada 1957. Seperti pada saat pemerintahan Richard Nixon yang juga berasal dari Partai Republik, ia dinilai sangat tegas terhadap Israel. Nixon bertekad menekan Israel untuk mematuhi perjanjian yang akan diadakannya tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi dalam negeri AS.

Dari berbagai pengalaman inilah maka dukungan pemilih Yahudi akan lebih condong ke Partai Demokrat. Dan sumbangan dananya pun lebih banyak diberikan kepada Partai Demokrat, meskipun ada kalanya Partai Republik juga memberikan dukungan yang sama kepada Israel.

4.1.2.2 Kebijakan George Bush

George Bush pernah menyatakan bahwa AS sangat berkepentingan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Seperti yang pernah dikemukakannya di depan Kongres pada 6 Maret 1991:

"Perdamaian yang komprehensif harus ditegakkan sesuai dengan resolusi DK PBB no 242 dan 338 dan prinsip perdamaian. Hal ini

⁷ Alexander Kislov, Republican, Demokrat and Zionist Lobby, dalam *Zionism: Past and Present*, Social Sciences Today, 1976, hlm: 90-91

dipersiapkan untuk keamanan dan pengakuan atas Israel dan untuk mengesahkan hak politik Palestina".⁸

Pernyataan ini dituangkan dalam Konferensi Madrid pada akhir Oktober 1991. Ini merupakan satu keberhasilan besar dalam politik luar negeri George Bush yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden lain yang memerintah sebelumnya. Bush bersama menteri luar negerinya, James Baker berhasil mempertemukan Palestina dan Israel untuk pertama kalinya dan berhasil menekan Tel Aviv agar bersedia merundingkan kompromi teritorial (*land for peace*) karena Israel tidak lagi memandang Tepi Barat Sungai Yordan sebagai "tanah yang dijanjikan".

Duet Bush-Baker dinilai sebagian mengamat termasuk golongan "garis keras" terhadap Israel, dalam arti tidak pernah ada rekor yang mengindikasikan mereka sangat dekat dengan lobi Yahudi di AS.⁹ George Bush yang berasal dari kalangan bisnis perminyakan, bisnis yang tidak banyak digeluti oleh kaum Yahudi, mengindikasikan bahwa Bush dan keluarganya lebih dekat dengan elit negara-negara Teluk ketimbang dengan lobi Yahudi.

Tindakan Bush ini sedikit bertentangan dengan kebijaksanaan dari Partai Republik. Secara garis besar kebijakan Partai Republik terhadap Timur Tengah sama dengan Partai Demokrat

Sebelum kekalahannya dalam pemilihan presiden pada 1992, George Bush dikritik keras karena telah merusak secara berat hubungan Amerika dengan Israel. Politik Bush keliru karena secara salah telah melakukan tekanan terhadap Israel untuk membuat konsensi sepihak dalam proses perdamaian, mengabaikan boikot ekonomi yang dilakukan negara-negara Arab kepada Israel dan tidak memperhatikan jalan lain

⁸ Bernard Reich, *The United States and Israel: The Nature of A Special Relationship*, dalam *The Middle East and The United States, Historical and Political Reassessment*, Westview Press Inc., New York, 1996, hlm: 243-244

⁹ Kompas, 1 Nopember 1991

kearah perdamaian, menolak permintaan bantuan kemanusiaan Israel untuk pemukiman Yahudi Rusia, dan membiarkan keamanan Israel terus terancam dengan menjual senjata canggih seharga milyaran dollar kepada negara Arab.¹⁰

Tetapi menjelang pemilihan Presiden AS tahun 1992, usaha proses perundingan Arab-Israel tersebut sampai saat kejatuhan Bush, tidak nampak hasil seperti yang diharapkan. Usaha yang dilakukan untuk mengupayakan proses perundingan itu adalah menekan "habis-habisan" Israel agar memberikan konsesi yang lebih besar pada pihak Arab atau justru melunakkan sikapnya pada Israel (yang dibarengi dengan tekanan pada pihak Arab).

Sebenarnya kedua pilihan itu sama-sama mengandung resiko yang kurang menguntungkan George Bush untuk terpilih kembali. Karena tekanan yang berlebihan pada Israel mengakibatkan Bush semakin tidak populer di mata kaum Yahudi AS yang kekuatan lobinya sudah sangat terkenal. Atau sebaliknya, bersikap lunak pada Israel bisa mengakibatkan gagalnya proses perundingan Timur Tengah.¹¹

Terbukti menjelang pemilu 1992, George Bush dengan berani mencekal bantuan jaminan utang ke Israel sebesar 10 miliar dolar yang akan digunakan pemerintah Likud dibawah pemerintahan Yitzhak Shamir untuk membangun pemukiman Yahudi di daerah pendudukan. Akibatnya seorang jutawan Yahudi dari New York yang selama ini selalu memberikan sumbangan dalam jumlah besar kepada Partai Republik menyatakan bahwa Presiden Bush dan partainya tidak akan menerima sumbangan dari pihaknya jika dia masih ngotot mencekal soal pemberian jaminan hutang ke Israel tersebut.¹² Pada akhirnya Presiden George Bush

¹⁰ Ibid, hlm: 64

¹¹ Dhurorudin Mashad, Masa Depan Perdamaian Timur Tengah, dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol:14, Gramedia, 1993, hlm:119

¹² Suara Hidayatullah, 3 Juli 1997

bener-bener mengalami kegagalan dalam meraih kembali kursi kepresidenannya dan dikalahkan oleh Bill Clinton dari Partai demokrat yang memang sangat pro-Israel.

Sebenarnya usaha Pemerintah George Bush hampir berhasil mencapai kesepakatan dalam perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai. Tetapi karena secara personal Bush melakukan kesalahan terhadap pemerintah Israel, maka Bush harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Dengan demikian perundingan tersebut akan terhambat karena penggantinya adalah Bill Clinton dari Partai Demokrat yang cenderung pro-Israel.

4.1.2.3 Kebijakan Bill Clinton

Pada pidato pencalonan diri Bill Clinton sebagai Presiden AS pada 1991, mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri dan dalam negeri tidak dapat dipisahkan. Menurut Clinton, jika AS tidak kuat di dalam negeri, maka AS tidak akan dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin dunia yang selama ini sudah dijalankan. Dan jika AS menarik diri dari dunia, maka di dalam negeri ekonomi AS akan menderita.

Presiden Clinton percaya bahwa kebijakan luar negeri AS tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral yang dianut kebanyakan rakyat AS. Dalam pidatonya tersebut Clinton menyatakan bahwa:

"Kita tidak dapat mengabaikan bagaimana pemerintah lain memperlakukan rakyatnya, entah lembaga-lembaga mereka demokratis atau menindas, entah mereka membantu mendorong atau menghalangi tindakan tidak sah diluar perbatasan negara mereka."¹³

Ini tidak berarti bahwa AS harus membatasi hubungannya dengan negara-negara non demokrasi. Sebaliknya, AS harus bersedia

¹³ Richard A. Bumstead, Bill Clinton, Presiden Ke-42 Amerika Serikat, United States Information Agency, Jakarta, 1992, hlm: 13

menggunakan kekuatan diplomatik dan reformasi pasar diseluruh dunia dan bahkan mensyaratkan kebijakan bantuan asing dan keringanan utang dengan kemajuan demokrasi yang bisa ditonjolkan.

Dalam buku pegangan kampanye Clinton dan Albert Gore yang berjudul *Putting People First*, satu-satunya masalah politik luar negeri AS yang dibahas hanyalah mengenai Israel dan Palestina. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa Clinton dan Al Gore tidak akan membiarkan Israel kalah. Pemerintah Bush dikritik keras karena telah merusak secara berat hubungan Amerika dengan Israel.

Selain itu ditegaskan bahwa pemerintah Clinton dalam mempertahankan Jerusalem sebagai ibukota Israel; menentang pendirian negara Palestina merdeka; membangun hubungan strategis dengan Israel dan dengan jelas memelihara *qualitative military edge* Israel terhadap Arab; dan membangun kerjasama ekonomi yang lebih erat.¹⁴ Bush pun sebenarnya juga menolak kehadiran negara Palestina, namun ia tidak pernah secara "ekspisit-demonstratif" memperlihatkan sikapnya itu.

Setelah berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden pada 1992, sikap Bill Clinton sangat menentukan bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Seandainya pada waktu itu Partai Republik tetap berkuasa, maka peluang perdamaian kemungkinan besar tetap terbuka. Sebaliknya, dengan kemenangan Partai Demokrat ada kemungkinan peluang itu justru semakin tertutup.¹⁵ Karena dalam konteks AS di kawasan Timur Tengah, Partai Demokrat lebih pro-Israel ketimbang Partai Republik.

Ketika Bill Clinton berhasil mengalahkan George Bush, banyak orang (di dalam maupun di luar Amerika) yang berharap Amerika tidak

¹⁴ M. Amien Rais, dalam Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah, UGM, 1993, hlm :64

¹⁵ Dhurorudin Mashad, op. cit., hlm:117

akan meneruskan "politik Rambo" dua pendahulunya, Ronald Reagan dan Bush. Alasannya memang sangat sederhana; *pertama*, Clinton adalah tokoh pertama dari generasi "baby boomer" dan pasca perang dunia yang berhasil tampil sebagai presiden AS. Ia pun dikenal sebagai aktivitas anti-perang Vietnam. *Kedua*, sejak awal ia menunjukkan komitmennya pada upaya pembenahan masalah domestik (khususnya ekonomi) daripada. *Ketiga*, sebagai seorang yang mewakili Partai Demokrat, Clinton dipercaya akan lebih menekankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan "ideologi" partainya, yang lebih mengutamakan aspek-aspek hak-hak asasi manusia dan demokratisasi. Tetapi ternyata Clinton tetap bertindak seperti dua pendahulunya.

Bagi Clinton, penyelesaian konflik Timur Tengah hanya bisa terwujud jika negara-negara Arab mengakhiri boikot ekonominya terhadap Israel. Pemboikotan itu sama artinya dengan melancarkan perang ekonomi terhadap Israel. Disamping itu, pihak Arab hendaknya tidak hanya menuntut tapi juga harus bersedia memberikan konsesi pada Israel. Dengan demikian, akan bisa diselesaikan konflik yang berlandaskan pada Resolusi DK PBB No. 242 serta Persetujuan Camp David.

Kebijakan Clinton di Timur Tengah pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal pokok, yaitu menjamin keunggulan militer Israel dan menjaga status quo dengan mengendalikan negara-negara yang dicapnya "radikal" yaitu Iran, Irak, Syiria dan Sudan.¹⁶

Pada pemerintahan kedua Bill Clinton, masalah perdamaian Timur Tengah tetap menjadi agenda utama politik luar negerinya. Tanggungjawab Clinton terhadap kebijakan luar negeri dalam perdamaian di wilayah Timur Tengah begitu besar, hal ini tampak dari

¹⁶ Jawa Pos, 30 Mei 1996

usaha-usaha Bill Clinton dalam mengupayakan jalannya perdamaian antara kedua pihak.

Sebagai contoh, kendati dikritik oleh sebagian anggota kongres, Clinton bersikeras memprakarsai pertemuan Israel-Palestina di Washington pada awal November 1996, dengan dalih menyelamatkan proses perdamaian akibat terjadinya bentrokan berdarah antara warga Palestina dan tentara pendudukan akhir September 1996 lalu. Tetapi pertemuan itu gagal mencapai kata sepakat menyangkut konflik Palestina-Israel.¹⁷

Namun sangat diragukan Clinton mampu menjadi hakim yang adil bagi proses perdamaian tersebut karena pada masa jabatannya yang kedua ia mengangkat para pejabat yang sangat pro-Zionis dalam kabinet barunya dan dalam tim pembuat kebijaksanaan Timur Tengah di Deplu AS, sehingga kemungkinan besar akan mempengaruhi sikap Washington terhadap kesepakatan itu.

Para pengamat politik menilai bahwa meskipun Clinton berupaya seimbang dalam melakukan pendekatan dengan warga Arab di satu pihak dan Yahudi di pihak lain, namun ia mengalami dilema yang cukup serius akibat sering mendapatkan tekanan dari kelompok zionis yang dikenal sebagai penyumbang dana utama bagi biaya kampanye Partai Demokrat. Atas tekanan keras dari kelompok lobi Yahudi, Clinton gagal mengakui negara kedaulatan Palestina.

Namun ada hal yang mengejutkan yang terjadi pada bulan Desember 1997 lalu, Presiden AS mendesak PM Israel untuk menghasilkan "kemajuan substansial" dalam perundingannya dengan Palestina. Washington ingin Israel bertindak "serius dan bisa dipercaya" dalam memenuhi jadwal penarikan mundur pasukannya dari Tepi Barat.

¹⁷ Suara Karya, 1 November 1996

BAB IV

PENGARUH LOBI YAHUDI TERHADAP KEBIJAKAN CLINTON

DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

4.1. Kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina.

Kebijakan politik luar negeri AS mempunyai jangkauan global berprinsip pada 3 pola sentral, yakni pengalaman sejarah, penegakan ide-ide demokrasi dan kepentingan global. Ketiga pola sentral ini digunakan untuk memahami strategi global AS, yaitu usaha-usaha untuk mempertahankan hegemoninya, mampu untuk memperbesar dan memperluas hubungan kerjasama dengan negara-negara lain (dalam hal ini dengan sekutunya).

Sebagai negara superpower dan telah memenangkan Perang Teluk II, Amerika Serikat yang merasa sebagai negara yang paling bertanggungjawab dalam menangani Krisis Teluk dan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menata peta politik di Timur Tengah. Salah satunya adalah berusaha mengupayakan perdamaian Timur Tengah dengan menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam upaya merealisasikan perdamaian tersebut, AS melakukan lawatan diplomatik, namun lawatan diplomatik ini tidak berjalan mulus, meskipun telah ditawarkan adanya beberapa konsesi dan jaminan ekonomi untuk memperkuat usul AS terhadap perundingan damai dimana tujuan lawatan tersebut untuk mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

Amerika sebagai negara pemrakarsa perundingan itu berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang menghambat proses perundingan perdamaian. Sebagai upaya mengatasi perbedaan itu, AS

yang menyatakan bahwa setiap anggota kongres akan diberi bantuan dana apabila ia benar-benar bersikap baik terhadap Israel.¹⁹

Sedangkan dalam birokrasi seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, posisi lobi Yahudi telah merasuk dengan membentuk jaringan diantara para pejabat. Demikianlah upaya lobi Yahudi untuk mempengaruhi penentuan kebijaksanaan politik luar negeri yang membidangi Timur Tengah.

4.2.1. Pengaruh Lobi Yahudi pada Bidang Pemerintahan

Kekuatan Lobi Yahudi dalam pemerintahan AS telah menguasai dan mempengaruhi para pejabat dan lembaga pemerintahan dengan sentimen pro-Israel. Seperti kongreswan dikuasainya dengan jalan memberi dukungan dana, media massa pada waktu pemilihan di distriknya. Sedangkan dalam birokrasi seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, posisi Lobi Yahudi telah merasuk dengan membentuk jaringan diantara para pejabat. Kiprah Lobi Yahudi di AS adalah demi eksistensi negara Israel. Dengan kekuatannya dalam setiap tingkat pemerintahan. Lobi Yahudi berhasil mengontrol politik luar negeri AS terhadap Israel.

1. Di Gedung Putih

Tekanan Lobi Yahudi atas Gedung Putih dilakukan pada berbagai level. Tekanan level pertama biasanya ditujukan langsung pada orang yang memegang atau yang sedang mengupayakan jabatan presiden. Terhadap kandidat presiden, bantuan yang diberikan tidak tanggung-tanggung mulai dari jumlah suara

¹⁹ Merdeka, 10 Oktober 1997

pemilih Yahudi, media massa sampai dana-dana kampanye. Sebagai imbalannya lobi Yahudi dapat menekan *foreign policy* AS di Timur Tengah untuk mendukung Israel. Hal ini dialami oleh hampir semua Presiden AS, sejak berdirinya Israel pada 1948.

Sedangkan tekanan level kedua dilakukan terhadap presiden yang telah menduduki Gedung Putih penekanan dilakukan oleh sahabat-sahabat pribadi yang pengaruhnya hanya terbatas pada presiden itu sendiri.

Tekanan level ketiga dilakukan terhadap kepresidenan dilakukan pada pejabat penting di departemen-departemen seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan juga Dewan keamanan Nasional. Di tempat-tempat ini para pejabat pemerintah dipengaruhi dengan sentimen pro Israel, sehingga laporan mereka pada atasan (kabinet/wakil mereka) bersifat pro Israel. Dengan demikian dalam pemerintah dari level terendah sudah dikuasai oleh Lobi Yahudi.

2. Pada Birokrasi.

Dalam pemerintah, jaringan intelejen Lobi Yahudi telah merasuk ke dalam birokrasi. Dengan sejumlah besar sukarelawan disemua jenjang yang akrab dengan sumber pemerintah, yang berkaitan dengan masalah-masalah Israel telah dibuat tidak berdaya menghadapi tekanan Lobi Yahudi, walaupun suatu informasi yang sangat rahasia pasti akan diperoleh. Bila pemerintah AS mengetahui mengenai informasi rahasia yang telah diperoleh Lobi Yahudi jarang sekali atau bahkan tidak pernah diselidiki oleh pejabat yang berwenang.

Terhadap kerahasiaan sumber informasi di AS, Lobi Yahudi dapat secara terang-terangan menembus pertahanan yang paling

kokoh untuk memperoleh informasi rahasia yang mereka inginkan, namun jika mereka bermaksud menjaga informasi yang telah mereka peroleh agar tetap rahasia, maka siapapun tidak akan bisa menembus pertahanan mereka.²⁰

3. Pada Capitol Hill

Kongres AS yang secara eksplisit mempunyai peranan besar untuk mempengaruhi kebijakan Luar Negeri juga menjadi sasaran Lobi Yahudi. AIPAC sebagai organisasi Yahudi terbesar di AS berhasil mengontrol Kongres di Capitol Hill, terutama Komite Urusan Luar Negeri yang membidangi Timur Tengah.

Seperti dalam pemilihan presiden, kandidat Kongres yang pro Israel dibantu baik dalam bentuk dana, media massa dan suara pemilih Yahudi. Sebagai konsekuensinya, hampir seluruh anggota kongres mentaati permintaan Lobi Yahudi, sebab umumnya mereka menganggap AIPAC sebagai representasi langsung di Capitol Hill dari sebuah kekuatan politik yang bisa membuka dan menutup peluang-peluang mereka pada waktu pemilihan anggota kongres.²¹

Terhadap para calon anggota Kongres dan Senat, pelobi Yahudi yang berada di Kongres menanyai setiap kandidat anggota Kongres dan Senat tersebut mengenai pandangannya terhadap Israel dan Timur Tengah. Sehingga mereka bisa menentukan sikap dan dukungan mereka terhadap kandidat anggota tersebut. Jika kandidat tersebut bersikap positif terhadap Israel, maka ia akan dibantu sepenuhnya oleh lobi Yahudi dalam proses menjadi

²⁰ Paul Findley, *Mereka Berani Bicara*, Mizan, Bandung, 1993, hlm: 211

²¹ *Ibid*, hlm: 55

anggota Kongres atau Senat. Tetapi jika tidak maka ia akan tersingkir dari keanggotaan dewan perwakilan tersebut.

Seorang partisipan Konferensi Internasional tentang Palestina di Jenewa, Lord Mayhew mengungkapkan bagaimana sebenarnya Kongres AS seringkali merupakan suatu badan perwakilan yang bertingkah laku bebas sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri. Namun dalam masalah Palestina, Kongres AS secara finansial sangat korup, sebab ia telah dibeli oleh suatu pemerintah asing yaitu pemerintah Israel melalui lobi zionisnya di AS.²²

Begitu kuatnya AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan Kongres di Timur Tengah, maka tidak heran kalau kepadanya bahkan Presiden AS menoleh jika ia mempunyai problem pelik menyangkut konflik yang melibatkan Israel.

Keberhasilan Lobi Yahudi dalam menghancurkan orang-orang yang keluar dari relnya amat mengejutkan, terutama di Kongres. Pada setiap pencalonan seorang senator, para pelobi Yahudi mencari calon yang loyal terhadap Israel dan mereka akan mengontak jaringan mereka untuk mengetahui siapa yang sangat memerlukan dana dalam kampanyenya dan kemudian mereka akan memberikan bantuan tersebut.

Pengumpulan pendapat memperlihatkan bahwa pluralitas Yahudi Amerika dan rakyat AS secara keseluruhan menentang kebijaksanaan tentang Israel. Lazimnya penentangan ini tercermin dalam pernyataan dan rekaman-rekaman voting para legislator mereka. Tetapi dalam masalah ini pluralitas pandangan tidak terwakili.

²² Ibid, hlm: 16

Lobi telah meraih kekuatan yang jauh melampaui tingkat jumlahnya yang tercatat. Mereka yang aktif dibarisannya hanyalah bagian sangat kecil dalam komposisi penduduk AS. Tetapi konsentrasi warga mereka di negara-negara bagian yang berkedudukan penting dalam menentukan hasil pemilu nasional disertai kemampuan unik mereka dalam memobilisasi sumber-sumber kampanye dan opini publik-memberi mereka pengaruh dalam proses politik yang jauh melampaui proporsi jumlah mereka.

Lebih penting daripada itu adalah pengabdian dan komitmen kuat yang dimiliki para partisan demi membela kepentingan mereka. Aktivitas-aktivitas mereka ditopang oleh pemerintah Israel, secara terbuka melalui kedutaannya di Washington dan secara gelap lewat operasi Mossad, dinas rahasia luar negeri Israel di seluruh AS.

4.2.2. Pengaruh Lobi Yahudi Pada Pemerintahan Presiden Bill Clinton.

Presiden Bill Clinton dan Wakilnya, Al Gore secara resmi memasuki Gedung Putih pada tanggal 20 Januari 1993. Pemerintahan Bill Clinton dinilai sangat transparan dalam sikapnya yang pro Israel. Seperti telah diketahui bahwa Partai Demokrat lebih pro Israel dibanding Partai Republik karena mayoritas masyarakat Yahudi di AS lebih condong berpihak ke Partai Demokrat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa lobi Yahudi AS telah menyumbang tidak kurang dari 23 juta dollar bagi keperluan kampanye Pemilu Bill Clinton dan bahwa sekitar 80% orang Yahudi AS memang berada di pihak Demokrat. Sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan AS di Timur Tengah akan tetap berpihak pada Israel.

4.2.2.1 Dukungan Lobi Yahudi Terhadap Pemerintahan Bill Clinton.

Kemenangan Clinton pada pemilu tahun 1992 tidak lepas dari dukungan pemilih Yahudi di Amerika. Penggunaan "Israel card" sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Yahudi Amerika. Oleh karena itu, Clinton dari Partai Demokrat yang dinilai sangat loyal terhadap Israel dapat memenangkan suara pemilih Yahudi.

Tokoh-tokoh Yahudi memandang Clinton sebagai sahabat Yahudi. Seperti halnya Ronald Reagan, Clinton mempunyai banyak teman Yahudi dan ia merasa nyaman dengan Yahudi. Karena itu Clinton banyak mendapat bantuan dari tokoh-tokoh AIPAC saat melaksanakan kampanyenya. Seperti, David Ifshin, Morris Amitay dan Micky Kantor, yang semuanya bekerja untuk kampanye Clinton.²³

Sementara itu, Wakil Presiden Al Gore, Sekretaris Pertahanan Les Aspin dan Direktur CIA James Woolsey mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kekuatan pro-Israel dalam Partai Demokrat. Aspin telah menerima donasi lebih dari 86.000 dolar dari lobi Yahudi. Woolsey seperti halnya Aspin adalah anggota dari Jewish Institute for National Security (JINSA). Keduanya mendukung kerjasama militer dan intelejen dengan Israel.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan lobi Yahudi sangat besar dan sangat dekat dengan pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan Clinton. Sehingga dapat mempengaruhi Clinton dalam memposisikan orang-orang Yahudi pada jabatan penting dalam pemerintahannya agar pemerintahan Clinton dapat tetap konsisten terhadap Israel.

Lobi Yahudi juga mempengaruhi Clinton dalam mengangkat pejabat-pejabat negara yang akan membantunya. Para tokoh Yahudi akan menuntut Clinton untuk mengangkat pejabat yang berasal dari orang-

²³ Journal of Palestine Studies XXII, no.2, (Winter 1993), hlm:80

²⁴ Journal Of Palestine Studies XXII, no. 4, (Summer 1993), hlm: 65-66

orang Yahudi pada posisi penting dalam pemerintahannya. Mereka sangat marah saat Clinton mengangkat Robert B. Reich sebagai sekretaris buruh dan Zoe Baird sebagai penuntut umum, karena mereka dinilai tidak pro-Israel.

Dengan berbagai tindakan Bill Clinton yang banyak membantu Israel dalam kebijakan luar negerinya, akhirnya Bill Clinton berhasil menjabat sebagai Presiden untuk yang kedua kalinya. Dan pada pemerintahan kedua Presiden Bill Clinton tersebut banyak mengangkat para pejabat yang sangat pro-Israel pada kabinet dan tim pembuat kebijaksanaan Timur Tengah di Departemen Luar Negeri AS. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa pemerintahan kedua Presiden Bill Clinton ini merupakan kabinet yang paling pro-Zionis dalam sejarah kepresidenan AS.

Penunjukan tersebut antara lain pengangkatan Medelaine Albright sebagai Menteri Luar Negeri AS, dimana sebelumnya menjabat sebagai duta besar di PBB yang paling membela langkah dan kepentingan Israel. Penunjukan Martin Indyk, mantan duta besar AS di Israel, sebagai asisten Menteri Luar Negeri urusan Timur Tengah.²⁵

Clinton juga mengangkat pentolan Yahudi dari partai Republik yakni Wiliam Cohen sebagai Menteri Pertahanan. Samuel "Sandy" Berger dipromosikan menjadi direktur National Security Council (NSC). Tokoh zionis lain yang ikut mengendalikan Gedung Putih ialah Ramh Israel Emmanuel yang menjabat sebagai penasehat senior urusan politik, dan Dennis Ross sebagai utusan khusus AS untuk perundingan damai Timur Tengah. Tokoh-tokoh yang ditunjuk tersebut adalah mantan tokoh AIPAC, sehingga hal ini makin menegaskan arah kebijakan luar negeri AS yang makin pro Israel.

²⁵ *Republika*, 22 Juli 1997

Menurut Albright, AS memveto rancangan resolusi DK PBB itu karena resolusi itu tidak sejalan dengan prinsip perdamaian di Timur Tengah, dimana proses perdamaian itu agar sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh Arab dan Israel tanpa campur tangan DK PBB. Dalam pandangan AS PBB tidak berhak menentukan status tetap Al-Quds sampai pada Mei 1996 sesuai dengan Deklarasi Prinsip.²⁷

Alasan AS dalam melakukan veto agar persoalan Israel-Palestina tidak mengundang keterlibatan organisasi internasional dan dapat diselesaikan secara bilateral, sesungguhnya bertentangan dengan keterlibatan AS sendiri sebagai sponsor utama dalam perundingan di Timur Tengah selama ini.²⁸

Jika AS tidak menghendaki status Al Quds diusik sebelum Mei 1996, seharusnya mereka tidak boleh membiarkan Israel menganeksasi sebagian dari wilayah ini. Namun sekali lagi, ini karena AS memang tidak akan pernah mampu menghalangi apapun yang dilakukan Israel. Bagaimanapun hal ini tidak dapat dilepaskan dari perlindungan AS terhadap Israel dalam melancarkan setiap usahanya menguasai Palestina, khususnya Jerussalem. Dukungan Washington terhadap Israel melalui veto ini, menurut sebagian pengamat adalah bagian dari tradisi klasik AS, terutama menjelang pemilihan Presiden dalam mencari dukungan dari warga Yahudi, sehingga Bill Clinton melakukan serangkaian kebijakan "mencari muka" dengan melakukan veto demi kepentingan Yahudi.

Atas tekanan keras dari kelompok lobi Yahudi, Clinton gagal mengakui negara kedaulatan Palestina. Sejauh ini Clinton hanya mendukung upaya proses perdamaian Arab-Israel. Meskipun Clinton berupaya seimbang dalam melakukan pendekatan dengan pihak Arab di satu sisi dan Yahudi di sisi lain, namun ia menghadapi dilema yang cukup

²⁷ *Republika*, 24 Mei 1995

²⁸ *Pikiran Rakyat*, 8 Juni 1995

serius akibat sering mendapatkan tekanan dari kelompok zionis yang dikenal sebagai penyumbang dana utama bagi biaya kampanye Partai Demokrat.

Clinton yang selalu konsisten dengan sikap pro-Israelnya, dinilai akan semakin sulit menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Bush yang dianggap berhasil menekan Israel ternyata gagal menciptakan perdamaian di Timur Tengah, apalagi jika Clinton berkeras dengan sikap pro-Israelnya. Sikap pro-Israel Clinton justru dapat membuat Tel Aviv semakin enggan menerima gagasan *land for peace* yang dianggap sebagai satu-satunya formula paling realistis bagi pemecahan masalah konflik Israel-Palestina.²⁹

Pengaruh Lobi Yahudi sangat kuat dalam pemerintahan Clinton terutama pada diri wakil Presiden Al Gore, sehingga bisa mendesak orang yang jelas posisinya pro-Israelnya untuk mengepalai bidang Timur Tengah, dimana fokus utamanya terkait dengan konflik Israel-Palestina. Dengan dominasi tokoh Yahudi yang memenuhi kursi tim kebijakan luar negeri Gedung Putih tersebut, bisa dibayangkan rumusan kebijakan Timur Tengah Washington tidak dapat diharapkan sebagai penengah dalam perundingan damai Israel-Palestina. Tak heran kalau sejak saat itu orang semakin pesimistis pada netralitas Washington dalam perundingan damai Timur Tengah.

4.2.3. Pengaruh Lobi Yahudi dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina

Kekuatan Lobi Yahudi dalam pemerintahan AS telah menguasai dan mempengaruhi para pejabat dan lembaga pemerintahan dengan sentimen pro-Israel. Dengan pengaruh yang sangat kuat ini, Lobi Yahudi berusaha mempengaruhi penentuan kebijakan politik luar negeri yang

²⁹ M. Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm:47

membidangi Timur Tengah. Dimana pemerintah dibuatnya untuk selalu menoleh ke Lobi Yahudi atau paling tidak mengambil kebijaksanaan yang tidak merugikan Israel.

Seperti misalnya keterlibatan AIPAC sebagai salah satu lobi Yahudi dalam Camp David, dimana AIPAC mengeluarkan amandemen yang merintangi komunikasi apapun antara PLO dan pemerintah AS, bahkan untuk pihak ketiga sampai PLO mengakui Israel. Ini dimaksudkan untuk menyumbat segala bentuk kontak informal dengan pimpinan Palestina yang selama ini diam-diam dilakukan baik oleh pemerintah Carter maupun Reagan.

Saat pemerintahan Benjamin Netanyahu, ia pernah meminta AIPAC agar mendesak Clinton supaya bersedia menekan Presiden Palestina, Yasser Arafat. Sebelumnya, Arafat telah mengirim surat kepada Clinton dan memintanya agar semua langkah perdamaian baru yang diusulkan AS menuntut agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi.³⁰

Sikap AS dalam mendukung ide *land for peace* dipengaruhi oleh kuatnya faktor Israel dan kemampuan Lobi Yahudi dalam mendikte politik luar negeri AS di Timur Tengah, maka ide *land for peace* tersebut memerlukan kompromi dengan Israel, sehingga konferensi perdamaian Israel-Palestina tersebut pada hakekatnya tergantung dari ketulusan AS untuk menciptakan perdamaian dengan Israel.³¹

Menurut Muwaffak Allaf, ketua delegasi Suriah dalam perundingan perdamaian Timur Tengah yang disponsori Washington, Kementerian Luar Negeri Israel telah berhasil mengendalikan Deplu AS. Ia menambahkan bahwa sebenarnya para pejabat AS untuk utusan Timur

³⁰ Merdeka, 8 April 1997

³¹ Agung Purwanto, Kebijakan Luar Negeri AS Pasca Perang Teluk II, Laporan Penelitian, Univ. Jember, 1995, hlm: 36

Tengah mempunyai wajah orang Amerika tetapi memiliki lidah orang Israel. Sebagian besar pejabat AS yang menjadi koordinator dalam perundingan Timur Tengah adalah Yahudi Amerika. Dalam hal ini, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa AS tidak bisa dipercaya akan mampu menjadi penengah yang adil dalam konflik Israel dan Palestina.³²

Israel selalu memperoleh konsesi lebih besar dari AS dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Sebaliknya Palestina yang telah mendapat cap teroris dari AS, dukungannya pada Irak dan hancurnya basis utama perjuangan militer PLO akan semakin berat menghadapi tekanan Israel dalam perundingan.

Jika AS mau berpikir secara realistis, dukungannya terhadap Israel itu sangat merugikan pemerintah AS sendiri, baik secara finansial ataupun posisi AS sebagai negara superpower. Bantuan dana yang diberikan kepada Israel semakin lama semakin besar tanpa diimbangi dengan ketegasan AS dalam menyikapi tindakan Israel yang selama ini sering melanggar hukum internasional dan menginjak-injak hak asasi manusia bangsa Arab dan terutama orang-orang Palestina. Tindakan AS akan sangat berbeda bila hal tersebut dilakukan oleh negara lain.

Pengaruh mereka sangat kuat, sehingga sangat membutuhkan pemerintah AS dalam mendukung tindakan Israel dan membahayakan kepentingan-kepentingan AS. AS harus berusaha menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel dan mengumumkan syarat-syarat baru yang keras dan harus dipenuhi sebelum AS memberikan bantuan selanjutnya kepada Israel.

Demi kepentingan AS dan semua pihak, seharusnya AS memberi peringatan dengan tegas untuk menghentikan pelanggaran tanpa penundaan lebih lama lagi. Pemerintah AS harus menegaskan bahwa

³² Merdeka, 13 Januari 1997

bantuan AS akan ditangguhkan jika Israel tidak segera menarik pasukannya dari wilayah pendudukan dan memberikan hak-hak yang sama bagi warganya.

Sebenarnya cara terbaik bagi AS dalam membela Israel adalah dengan meraih kembali posisinya sebagai pendukung terhormat dari kebijaksannya yang tidak berat sebelah, yang adil bagi semua pihak. Dukungan AS dapat berlangsung terus guna meraih lebih jauh tujuan menciptakan perdamaian komperensif di Timur Tengah, tetapi ini tidak dapat diterapkan secara efektif selama lobi Yahudi-- sebagai corong komunitas Yahudi AS-- menuntut supaya AS memberikan dukungan tanpa syarat terhadap pandangan militer yang steril atas keamanan mereka.

Selain itu, sikap Clinton yang sangat pro-Israel membuat prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah semakin suram dan akan memberikan peluang bagi menguatnya kembali kaum ultra kanan radikal di Israel, yang bisa berdampak pada timbulnya rentetan kekerasan yang tak berujung pangkal di kawasan ini. Sementara itu usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian itu tidak cukup hanya terbatas pada pemberian dorongan bagi perundingan-perundingan diplomatik saja. Tetapi juga diperlukan ketegasan AS sebagai pihak ketiga dalam konflik tersebut.

Tampaknya nasib perundingan perdamaian Palestina-Israel masih dihadapkan pada berbagai rintangan yang tidak mudah diatasi. Kombinasi antara kaum Zionis Israel yang agresif tidak manusiawi dengan kelompok politisi AS yang tidak mengenal prinsip, itulah yang menghalang-halangi penyelesaian masalah Palestina secara damai.

BAB V

KESIMPULAN

Amerika Serikat sebagai negara superpower tunggal merasa bertanggungjawab atas semua konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya antara Israel dan Palestina. Amerika sebagai negara pemrakarsa perundingan berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara pihak-pihak yang bertikai.

Dalam usaha penyelesaian konflik tersebut, ternyata AS menerapkan politik standar ganda yang lebih banyak menguntungkan Israel. Hal ini dilakukan karena pembuatan keputusan yang berkompetensi dengan Timur Tengah dikuasai oleh Lobi Yahudi.

Pengaruh Lobi Yahudi semakin kuat saat pemerintahan Presiden Clinton yang berasal dari Partai Demokrat yang dinilai sangat konservatif dan sangat pro-Israel. Pejabat pada masa pemerintahan Presiden Clinton pun banyak yang diangkat dari tokoh-tokoh penting Yahudi, terutama bidang-bidang yang menangani masalah Timur Tengah. Sehingga AS cenderung memihak Israel dalam setiap konfliknya dengan negara-negara Arab khususnya Palestina.

Seharusnya AS sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia memberi tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam setiap perjanjian damai yang telah disepakati. Dimana dalam setiap kesepakatan itu, Israel harus menyerahkan wilayah pendudukan yang telah dikuasainya sejak 1967.

Akibat pengaruh Lobi Yahudi yang memasukkan sentimen pro Israel kepada setiap jenjang pemerintahan AS, maka negara superpower tersebut senantiasa menuruti apapun yang dikatakan Israel. Termasuk juga bantuan dana yang digunakan untuk memperluas pemukiman

Yahudi di wilayah pendudukan yang sebenarnya bukan menjadi hak Israel, sehingga hal ini semakin merugikan masyarakat Palestina yang semakin terusir dari negaranya sendiri.

Sebenarnya dukungan AS terhadap Israel tersebut sangat merugikan pemerintah AS sendiri, baik secara finansial ataupun posisi AS sebagai negara superpower. Bantuan dana yang diberikan kepada Israel semakin lama semakin besar tanpa diimbangi dengan ketegasan AS dalam menyikapi tindakan Israel yang selalu melanggar hukum internasional dan menginjak-injak hak asasi bangsa Arab.

Jika AS tetap menunjukkan sikapnya yang pro Israel, maka perdamaian yang semakin giat diupayakan tersebut akan menemui jalan buntu. Karena keberpihakan AS tersebut akan mendorong Israel untuk selalu melakukan pelanggaran terhadap semua kesepakatan damai yang telah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrifa'i, Fuad Bin Sayyid Abdurrahman, 1995, *Yahudi dalam Informasi dan Organisasi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Paramadina, Jakarta.
- Barnart, Clarence L. & Robert K. (ed.), 1988, *World Book Dictionary*, World Book Inc., Chicago, USA.
- Bumstead, Richard A., 1992, *Bill Clinton, Presiden Ke-42 Amerika Serikat*, United States Information Agency, Jakarta.
- Cahyono, Cheppy Hari, 1982, *Ensiklopedi Politika*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Carr, William G., 1993, *Yahudi Menggenggam Dunia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Djafar, Zainuddin, M.A., 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Findley, Paul, 1995, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi*, Penerbit Mizan, Bandung.
- , 1993, *Mereka Berani Bicara*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Garaudy, Robert, 1995, *Zionis Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 1978, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Lesch, David W. (ed), 1996, *The Middle East and The United States Historical and Political Reassessment*, Westview Press Inc., New York.
- Mashad, Dhurorudin, Masa Depan Perdamaian Timur Tengah, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Vol:14, Gramedia, 1993, hlm:119
- Mas'oed, Mochtar, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- , 1994, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analitis dan Teorisasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Munawwir, Imam, 1984, *Kebangkitan Islam dan Tantangan-tantangan yang Dihadapi dari Masa ke Masa*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Parsito, Andrik, 1994, *Strategi Global Superpower dalam Era Perang Dingin*, Sebelas Maret Univ Press, Semarang.
- Plano, Jack C., 1988, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Purwanto, Agung, *Kebijakan Luar Negeri AS Pasca Perang Teluk II*, Laporan Penelitian, Univ. Jember, 1995, hlm: 36
- Rais, M. Amien (ed), 1995, *Prospek Perdamaian di Timur Tengah (sebuah Tilikan Latar Belakang)*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta.
- , 1993, *Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah*, UGM, Yogyakarta.
- , 1990, *Timur Tengah dan Krisis Teluk, Sebuah Analisa Kritis*, Amarpress, Yogyakarta.
- Sergeyev, Sergei, 1976, *Zionism : Past and Present*, Social Sciences Today.
- Sihbudi, M. Riza, 1993, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- , M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, PT. Eresco, Bandung.
- , 1997, *Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sumanto, 1995, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, 1995, Yogyakarta.
- Surachman, Winarno, 1970, *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Transito, Bandung.

Jurnal dan Ensiklopedi

- Journal of Palestine Studies, Volume: XVI, No. 1, 1986
- Journal of Palestine Studies, Volume: XXII, No.1, 1992
- Journal of Palestine Studies, Volume: XXII, No. 2, 1993
- Journal of Palestine Studies, Volume: XXII, No. 4, 1993
- Jurnal Ilmu Politik, Volume: 2.
- Jurnal Ilmu Politik, Volume: 14
- Collier's Encyclopedia
- Ensiklopedi Nasional Indonesia
- The World Book Encyclopedia, Volume: 12

Surat Kabar dan Majalah

Jawa Pos, 6 April 1997

Jawa Pos, 30 Mei 1996

Merdeka, 8 April 1997

Merdeka, 13 Januari 1997

Pikiran Rakyat, 24 Maret 1997

Panji Masyarakat, 15 september 1999

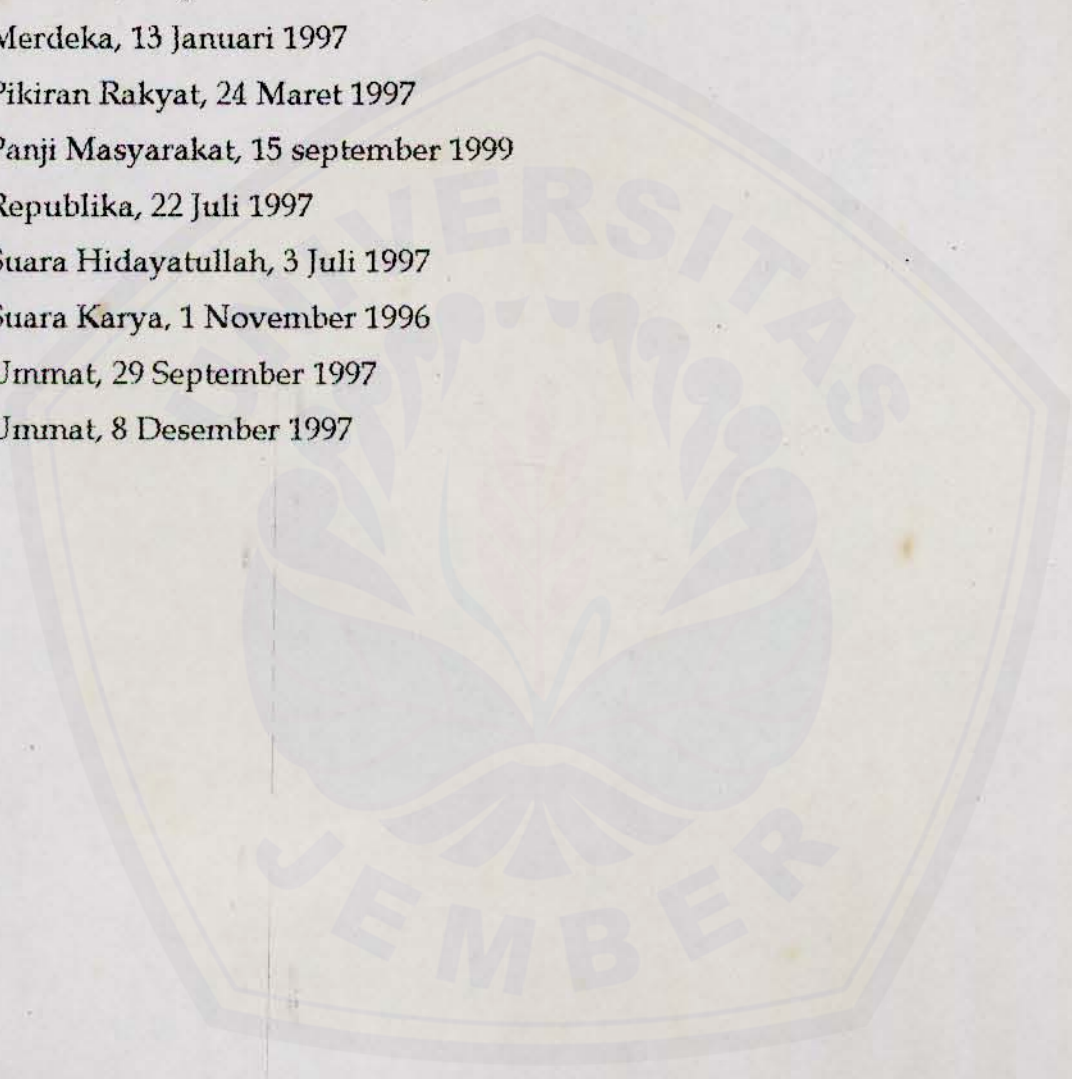
Republika, 22 Juli 1997

Suara Hidayatullah, 3 Juli 1997

Suara Karya, 1 November 1996

Ummat, 29 September 1997

Ummat, 8 Desember 1997





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R I
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 1122 /J25.2/PG/99
Lampiran :
Perihal : **Pemohonan ijin mengadakan Penelitian**

28 Desember 1999

Kepada : **Yth. Sdr. Pimpinan**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan *ijin* mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM : WAHYU ASMORO SUCI / E1A1 95 047
Dosen/Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Bangka V / 3 Jember
Judul Penelitian : Pengaruh Lobi Yahudi Terhadap Konflik Israel -
Palestina (Studi Kebijakan AS Pada Masa Bill -
Clinton)
Di Daerah : Jakarta
Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan

Untuk pelaksanaan *penelitian* tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dalam me-
ngadakan *penelitian* sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas
Universitas Jember
2. Dosen/Mahasiswa ybs.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : WAHYU ASMORO SUCI

Status : MAHASISWA

Alamat : JL. BANGKA V/3 JEMBER

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

..... Pengaruh Lobi Yahudi Terhadap Konflik
Israel-Palestina (Study Tentang
Kebijakan AS Pada Masa Bill Clinton).
.....
.....

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta 24 Jan 199-2000



Soedarso
Kepala Perpustakaan